

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG TRANSPORTASI  
SEWA KHUSUS ATAS ADANYA RISIKO KECELAKAAN**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**NADHIFAH HIDAYUNI HAMZAH**

**NIM: 145010107111070**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG TRANSPORTASI SEWA KHUSUS ATAS ADANYA RISIKO KECELAKAAN**. Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan oleh berbagai pihak yang akan penulis ucapkan terimakasih kepada :

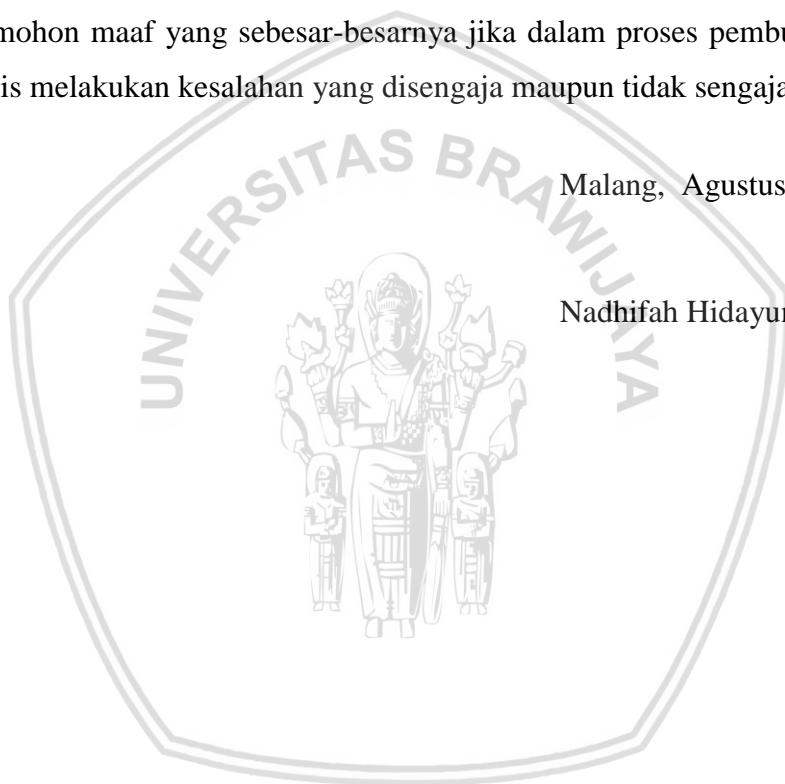
1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso SH., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Ibu Dr. Siti Hamidah SH., M.M., selaku Dosen Pembimbing Utama untuk setiap kesabaran, saran, dan motivasi yang disampaikan kepada penulis dalam setiap prosesnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Diah Pawestri Maharani SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua untuk setiap kesabaran, saran, dan motivasi yang disampaikan kepada penulis dalam setiap prosesnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua Orang Tua saya Bapak Kaimuddin Hamzah dan Ibu Maimuna Abdulrahman yang senantiasa memberikan semangat, kesabaran, doa, dan motivasi kepada saya.
6. Adik-adik tercinta saya, yakni Nafa, Nisa, Nafisa yang selalu memberikan doa, saran, dan semangat dari awal hingga akhir.
7. Kakak sepupu saya Firman Rato Rizky. Dan Onco Din Terimakasih selalu memberikan doa, memberikan kesabaran, serta memberikan semangat dari awal hingga akhir.

8. Teman-teman saya, yakni, Ega, Prilla ,Lely, Endah, Tyas, Shafira, Yulia, Debby, Aisyah, Melyn, Yani, Iva, shindora dan semua teman-teman saya lainnya. Terimakasih selalu menemani, membantu dan memberikan semangat dan kesabaran kepada saya.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja.

Malang, Agustus 2018

Nadhifah Hidayuni Hamzah



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Cover</b> .....	i
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	ii
<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Lembar Deteksi Plagiasi</b> .....	iv
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>Ringkasan</b> .....	viii
<b>Summary</b> .....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	13

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Perlindungan Hukum .....	15
B. Tinjauan Tentang Transportasi .....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan .....	18
D. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen .....	22
E. Pelaku Usaha .....	25
F. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab .....	28
G. Tinjauan Tentang Asuransi .....	31
H. Tinjauan Tentang Risiko .....	35
I. Tinjauan Tentang Ganti Rugi .....	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....	38



D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	39
E. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	39
F. Definisi Konseptual.....	40

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Transportasi Sewa Khusus Atas Adanya Risiko Kecelakaan .....	44
1. Bentuk Perlindungan Hukum Transportasi Umum Yang di Atur Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .....	44
2. Bentuk Perlindungan Hukum Transportasi Sewa Khusus Yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek .....	45
3. Bentuk Pelindungan Hukum Bagi Penumpang Transportasi Sewa Khusus Yang Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	48
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi Sewa Khusus Atas Adanya Risiko Kecelakaan Pada Penumpang Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	71
1. Pelaku Usaha Transportasi Sewa Khusus.....	71
2. Driver Sebagai Pelaku Usaha Penghubung .....	79

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian .....	9
Tabel 2. Perbedaan transportasi konvensional dengan transportasi online.....	58
Tabel 3. Perbedaan Tanggung Jawab dan Penggantian Kerugian antara GO-JEK Dengan UBER.....	77



## RINGKASAN

**Nadhifah Hidayuni Hamzah, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Agustus 2018, Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Transportasi Sewa Khusus Atas Adanya Risiko Kecelakaan**

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Transportasi Sewa Khusus Atas Adanya Risiko Kecelakaan. Terdapat kasus kecelakaan bagi pengguna (penumpang) transportasi sewa khusus yang mengalami cedera akan tetapi perusahaan transportasi sewa khusus GO-JEK dan UBER tersebut tidak memberi penggantian kerugian atau asuransi karena dalam syarat dan ketentuan pengguna.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi penumpang transportasi sewa khusus atas adanya risiko kecelakaan. dan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha jasa Transportasi Sewa Khusus atas adanya risiko kecelakaan di tinjau dari kedudukan konsumen sebagai pelaku usaha jasa transportasi sewa khusus menurut undang-undang perlindungan konsumen. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan Hukum Primer, sekunder, tersier yang kemudian akan di analisis dengan interpretasi gramatikal penafsiran yang sangat sederhana, dan interpretasi sistematis menafsirkan ketentuan perundang-undangan. Penulis memberikan kesimpulan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi sewa khusus yang pertama, di atur dalam peraturan menteri perhubungan nomor 108 tentang penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek. berdasarkan tiga landasan yaitu: (1). kepentingan nasional yang berada di atas segalanya. (2). kepentingan pengguna jasa dalam hal aspek keselamatan dan perlindungan konsumen seperti aturan yang mengatur tentang asuransi. (3). kesetaraan dalam kesempatan berusaha. Yang kedua Bentuk perlindungan hukum bagi penumpang transportasi sewa khusus yang di tinjau dari undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang di sebutkan dalam pasal 7 huruf g yaitu pelaku usaha memberi kompensasi, ganti rugi apabila jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian. Adapun tanggung jawab dari pelaku usaha adanya ganti rugi berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan akibat dari kecelakaan tersebut. Sanksi Perdata ganti rugi dalam bentuk: (1) Pengembalian uang (2) Penggantian barang, (3) Perawatan kesehatan (4) Pemberian santunan. Adapun Sanksi Administrasi yaitu maksimal ganti rugi dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi maksimal Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar pasal 19 ayat (2) dan (3) pasal 20 dan pasal 25.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penumpang, Risiko Kecelakaan.

## SUMMARY

***Nadhifah Hidayuni Hamzah, Business Civil Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, August 2018. Legal Protection For Passengers Of Special Rent Transportation With The Accidental Risk Presence***

*In this research the writer discusses about Legal Protection For Passengers Of Special Rent Transportation With The Accidental Risk Presence. There is accident case for the passenger of special rent transportation that experiences injury but the transportation company of GO-JEK and UBER give no compensation or insurance which is regulated in the term and condition for the users.*

*The research aimed at knowing and analyzing the legal protection for the passengers of special rent transportation with the accidental risk presence and to know and analyze the responsibility of the business owner of the special rent transportation for the accidental risk viewed from the consumers position as the special rent transportation business does according to the consumer protection in the research by using juridical normative method with statute approach and case approach. Primary, secondary, and tertiary will be analyzed with the grammatical interpretation of simple interpretation and systematical interpretation with the law stipulation. The writer give conclusion about the legal protection to the passenger of special rent transportation first regulated in the Transportation Minister Regulation Number 108 about Implementation of People Transportation Not In Designated Route with foundation of (1) national interest above everything (2) the service user in case of safety and consumer protection such as regulation that regulate about insurance (3) equality in the business opportunity. The second the legal protection for the passenger viewed from the Law NO 8 Year 1999 about the consumer protection stated in article 7 letter g, the businessman give compensation if the services received not suitable with the agreement. While the responsibility of the businessman with the compensation of money return or health care because of the accident. The civil sanction of compensation in the form (1) money return (2) goods substitution (3) health care (4) sympathetic care. While administrative sanction, maximum compensation in 7 days after transaction maximum Rp 200.000.000 (two hundred millions rupiah), through BPSK if violates the article 19 subsection (2) and (3) and article 25.*

***Keywords:*** legal protection, passengers, accidental risk.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dari masa ke masa yang semakin modern senantiasa sangat mempengaruhi pola pikir manusia untuk berperan aktif mengikuti dan mengembangkan pola kehidupannya di era globalisasi ini. Salah satu wujud dari perkembangan zaman yaitu adanya perkembangan teknologi yang memberikan banyak manfaat di berbagai aspek sosial. Teknologi yang di maksud di sini adalah teknologi informasi yang sangat di butuhkan dalam setiap kehidupan manusia sehari-hari misalnya jenis bisnis kecil maupun bisnis besar menggunakan sistem informasi jaringan dan teknologi internet untuk melakukan sebagian besar sistem elektronik. Perkembangan teknologi semakin hari semakin pesat dan kita hidup di zaman modern.

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini telah menempatkan pada posisi yang sangat strategis karena menghadirkan dunia tanpa jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisaasi dengan penggunaan sarana komunikasi dan teknologi informasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, keamanan, dan penegakan hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, **Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik**, Jakarta: Rineka Cipta, 2009 hal 39

Di zaman modernisasi ini manusia sangat bergantung pada teknologi karena teknologi merupakan kebutuhan sehari-hari baik orang tua maupun anak muda menggunakan teknologi berbagai aspek kehidupan setiap orang. Teknologi informasi telah dimanfaatkan mulai dari keperluan pribadi, keperluan sekolah, maupun keperluan bisnis. Teknologi dapat dimanfaatkan dalam bisnis transportasi. Belakangan ini teknologi telah berkembang pesat bahwa banyak perubahan terutama di bidang bisnis dan transportasi. Banyak bermunculan inovasi-inovasi baru bisnis baru yang berbasis aplikasi teknologi.

Bisnis transportasi merupakan bisnis yang potensial memberikan keuntungan. Berdasarkan jenisnya bisnis transportasi laut, transportasi darat, dan transportasi udara. Transportasi darat di suatu daerah membutuhkan suatu sistem transportasi yang efisien dan efektif berfungsi untuk melayani pemindahan barang dan manusia dalam batas antar wilayah. Kehidupan manusia sekarang dan dulu sangatlah berbeda, misalnya transportasi dulu hanya angkutan penumpang umum berbeda dengan sekarang selain angkutan penumpang umum ada juga transportasi sewa khusus yang memberikan akses aplikasi kepada kendaraan yang sudah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang yang telah memiliki kartu pengawasan yang diusulkan oleh badan hukum dengan kendaraan berbasis aplikasi online yang lagi ramai dibicarakan saat ini karena mudah di dapat, nyaman, cepat dan biaya murah. Transportasi didalam kehidupan saat ini telah menjadi suatu kebutuhan mendasar yang sangat penting terutama untuk masyarakat perkotaan. Fungsi transportasi dalam aktifitas di perkotaan memiliki peranan penting yang



berpengaruh di dalam segala aspek kehidupan.<sup>2</sup> Sejarah transportasi diawali dengan roda sekitar 3500 tahun sebelum masehi, yang digunakan untuk mempermudah memindahkan suatu barang. Wujud paling sederhana dari transportasi secara teoritis adalah semua hal yang dipengaruhi oleh kehidupan manusia. Memasuki abad ke 20 dengan pesatnya perkembangan teknologi dan industri transportasi berubah menjadi aspek yang paling dibutuhkan oleh manusia. Tentu saja perkembangan teknologi di setiap negara berbeda-beda dengan mengikuti perkembangan teknologi di setiap negara masing-masing.<sup>3</sup>

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam aktivitas manusia sehari-hari. Mengetahui pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus di rangkai dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat keperluan lalu lintas dan pelayanan angkutan tertib, nyaman, cepat, lancar, biaya murah.<sup>4</sup> Apalagi di kehidupan kota yang semakin canggih dan semua orang terburu-buru karena aktivitasnya masing-masing maka dari itu manusia sangat butuh transportasi yang mudah didapatkan dengan cara yang mudah pula yaitu dengan cara mendownload aplikasi transportasi online seperti GO-JEK /atau UBER dan memesan transportasi melalui aplikasi tersebut. dalam proses instansi, calon konsumen diminta untuk memberi pilihan setuju atau tidak setuju pada syarat dan

---

<sup>2</sup> **Kualitas Pelayanan Transportasi Publik** <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp84df2fea7bfull.pdf> di akses pada tanggal 7 maret 2018

<sup>3</sup> **Moda sejarah atau Sejarah Transportasi** [https://id.wikibooks.org/wiki/Moda\\_Transportasi/Sejarah\\_transportasi](https://id.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Sejarah_transportasi) di akses pada tanggal 5 maret 2018

<sup>4</sup> Abdulkadir muhamad, **Hukum Pengangkutan Niaga**, Citra Bakti, Bandung, 1998. hal.

ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan khusus. Apabila calon konsumen memencet tombol setuju pada saat itulah kontrak elektronik lahir.<sup>5</sup>

Menurut Subekti “Pengangkutan merupakan suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan pihak lain menyanggupi untuk membayar ongkosnya.” Maka secara tidak langsung pengangkut dan pengirim memiliki perikatan satu dengan yang lainnya. Dalam Undang-Undang dijelaskan<sup>6</sup>“Suatu perjanjian ialah dimana suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih<sup>7</sup>”.

Menurut “sudikno mertokusumo perjanjian adalah hubungan antara kedua belah pihak atau berdasarkan kata sepakat Kedua belah pihak itu sepakat untuk menentukan kaedah hukum atau peraturan atau hak dan kewajiban yang mengikatkan kedua belah pihak agar di jalankan dan di taati.”<sup>8</sup>Perjanjian menurut setiawan ialah dimana seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum.<sup>9</sup>Subekti memberikan definisi “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang saling berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu sama-sama berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”<sup>10</sup>

Dalam persyaratan dan ketentuan pengguna Uber ada pembatasan tanggung jawab yaitu uber tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak

---

<sup>5</sup> M. Arsyad Sanusi, **E commerce Hukum dan solusinya**, Cet 1, PT Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2001. Hal 63-64

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>7</sup> pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>8</sup> Sudikno mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, hal 97

<sup>9</sup> Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, cet ke VI, Putra A Bardin, Bandung 1999, hal 77

<sup>10</sup> R. Subekti. **Hukum Perjanjian**. Intermasa, Jakarta, 1996. hal 1



langsung, khusus, insidental, konsekuensial, termasuk kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti yang terkait dengan sehubungan dengan atau di akibatkan oleh pengguna layanan, meski uber telah di beri tahu akan kemungkinan kerugian tersebut.<sup>11</sup>

Munculnya pertanyaan menyangkut besarnya kerugian yang di akibatkan oleh kecelakaan di jalan, siapakah pihak yang bertanggung jawab dan mengganti kerugian akibat cidera yang di alami penumpang (konsumen). Hubungan antara Perusahaan Aplikasi dengan *Driver* (Pengemudi) adalah hubungan Kemitraan dan yang menjalani usaha pengangkutan ialah *Driver*.

Seharusnya pelaku usaha transportasi sewa khusus atau biasa di sebut transportasi *online* melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi agar penugguna mendapatkan asuransi bila terjadi kecelakaan. perusahaan perusahaan di indonesia semakin banyak dan berkembang. Dengan semakin banyaknya perusahaan perasuransian, baik dalam strategi penjualan maupun dalam jenis produk asuransi yang di tawarkan dengan berbagai jenis produk asuransi yang di tawarkan dengan berbagai jenis pelindungannya. Selain itu dengan semakin tingginya potensi beli dan kesadaran masyarakat untuk berasuransi, memotivasi perusahaan perasuransian untuk mengiming-imingi calon nasabah dengan berbagai iklan yang menggiurkan.<sup>12</sup>“Hubungan hukum antara penyedia layanan untuk konsumen (penumpang) adalah hubungan kemitraan karena tidak ada unsur perintah dan upah, bukan merupakan hubungan kerja. Sedangkan hubungan hukum antara *driver* (sebagai penyedia

---

<sup>11</sup> **Persyaratan Dan Ketentuan Uber** <https://www.uber.com/id/legal/terms/id/> di akses pada tanggal 5 maret 2018

<sup>12</sup> Tuti Rastuti, **Aspek Hukum Perjanjian Asuransi**, Pustaka Yustisia, yogyakarta, 2011. hal. iii

layanan) dengan konsumen (penumpang) adalah hubungan antara penyedia layanan jasa dengan konsumen.”<sup>13</sup> Dengan begitu yang di maksud pelaku usaha disini yaitu driver.

Permasalahan antara transportasi *online* dengan konvensional terjadi di berbagai daerah. Di awali dengan pendapatan transportasi konvensional menurun semenjak adanya angkutan online yang berbasis aplikasi. Karena itu pemerintah merevisi “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. Di antaranya menentukan batas atas dan batas bawah tarif taksi online. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Selanjutnya di revisi lagi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak Dalam Trayek”.

Ojek (driver )yang beraplikasi online ini merupakan pelaku usaha di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-jek Indonesia) sebuah perseroan terbatas yang di dirikan dan beroperasi secara sah berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan berdomisili di Indonesia, yang bergerak di bidang aplikasi perangkat seluler dengan merek dagang GO-JEK begitu juga dengan UBER yang bergerak di perusahaan teknologi yaitu PT Uber Teknologi Indonesia. Maka seharusnya PT transportasi sewa khusus yang berbasis aplikasi ini tunduk pada ketentuan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya dalam penelitian ini di singkat dengan (UU ITE). Pada pasal 4 UU ITE mengatur bahwa

---

<sup>13</sup>**Hubungan Antara Penyedia Aplikasi, Driver dan Penumpang**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56a9c0362ef3d/hubungan-antara-penyedia-aplikasi--idriver-i--dan-penumpang> di akses pada tanggal 22 april 2018

pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik di laksanakan dengan tujuan untuk:

- a. “Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.”

Dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 mengenai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah mengatur asuransi bagi perusahaan angkutan umum sedangkan transportasi sewa khusus yang berbasis aplikasi yang di atur dalam Peraturan Menteri selanjutnya di singkat PM 108 tahun 2017 tidak mengatur tentang asuransi. akan tetapi perusahaan yang menjual jasa seperti ojek online seharusnya mengasuransikan pelanggan atau penumpang yang menggunakan jasa ojek yang berbasis aplikasi online dan driver ojek yang berbasis aplikasi online ini merupakan pelaku usaha dan Pelaku usaha mempunyai tanggung Jawab terhadap konsumen di atur “undang-undang no 8 tahun 1999 pasal 19 ayat (1) yang menyatakan: Pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang / atau jasa yang di hasilkan atau yang di perdagangan.” dan Ayat (2) menyatakan :

“Ganti rugi sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilanya, atau perawatan kesehatan dan/atau

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pada Pasal 19 ayat (2) di kaitkan dengan kasus Hikmah Mubarak seharusnya mendapatkan santunan dari perusahaan Uber karena ojek yang di tumpangi Hikmah Mubarak warga Cempakah Putih Jakarta pusat mengalami kecelakaan saat menaiki ojek uber di jalan raya lampu merah kodam (UKI). Akibat dari kecelakaan tersebut Hikmah Mubarak mengalami luka dan memar, antara lain luka cedera di tulang kaki kiri dan terlihat bengkak, beengkak juga terjadi di pergelangan tangan kiri dan dada yang membuatnya merasa nyeri dan dada membiru. Hikmah mubarak mengaku sudah melakukan visum dokter di RS Pasar Rebo, jakarta timur dan menghabiskan biaya hampir Rp. 2 Juta. Akibat dari kecelakaan dirinya tidak mendapat uang santunan apapun dari manajemen uber selain hanya menerima pengembalian dana Rp. 1.500 dari biaya *Charge* perjalanan naik uber motor yang ia pesan. Hikmah mengaku sudah mengirimkan keluhan via aplikasi dan mendapat *feedback* berupa panggilan telepon dari Customer service uber dengan nomor telepon Malaysia dan menanyakan kejadian kronologi dan ketika Hikmah menanyakan asuransi bagi pelanggan di jawab tidak ada cover apapun dari asuransi dan biaya pengobatan di tanggung oleh driver uber.<sup>14</sup>

Penelitian serupa dengan yang penulis teliti pernah di lakukan sebelumnya, namun penulis memaparkan dan akan membahas isu hukum atau permasalahan yang berbeda dengan penelitian yang sebelumnya pada tabel berikut.

---

<sup>14</sup><http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/02/28/laka-saat-naik-ojek-uber-motor-penumpang-ini-mengaku-hanya-diberi-ganti-rugi-rp-1500> di akses pada tanggal 5 februari 2018

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

Tahun	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
2016	Yudi Satria Bombang (Universitas Hasanuddin Makasar)	“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Aplikasi Uber dan Grabcar Sebagai Angkutan Berbasis Aplikasi Online”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Kedudukan hukum badan usaha Uber dan Grabcar dalam penyelenggaraan angkutan “berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan?”</li> <li>2. “Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa aplikasi Uber dan Grabcare sebagai angkutan berbasis aplikasi online?”</li> </ol>	<p>“Kedudukan hukum badan usaha uber dan grabcar dalam penyelenggaraan angkutan berdasarkan uu no 22 tentang UU LLAJ uber dan grabcar tidak berkedudukan sebagai perusahaan penyelenggara angkutan umum karena keduanya tidak memiliki izin berdasarkan pasal 173 ayat (1) UU LLAJ</p> <p>Lalu perlindungan hukum bagi pengguna jasa uber dan grab car berdasarkan pasal 189 UU LLAJ ada jaminan bagi penumpang dan pengemudi yang di berikan oleh koperasi jasa trans usaha bersama dengan kopersi PPRI sebagai perusahaan angkutan umum dengan bermitra uber dan grabcar sebagai penyedia aplikasi penghubung.”</p>
2016	Dwi Nur Aini Habibah (universitas)	Aspek Hukum Yang timbul Dari Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Aspek Hukum apakah yang timbul dari kegiatan usaha</li> </ol>	Aspek hukum yang timbul dari kegiatan usaha ojek berbasis aplikasi atau online

	Pasudan Bandung)	Usaha Ojek Berbasis Aplikasi atau Online (Go-Jek)	<p>ojek berbasis aplikasi atau online (Go-Jek) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia” ?</p> <p>2. “Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengemudi dan pengguna jasa (Penumpang) ojek berbasis aplikasi atau online (Go-Jek) terhadap kemungkinan risiko yang terjadi” ?</p> <p>3. Upaya apakah yang dapat dilakukan pemerintah terkait dengan usaha ojek berbasis aplikasi atau online (Go-Jek) ?</p>	<p>meliputi aspek hukum perjanjian, aspek hukum transaksi informasi elektronik, Aspek hukum angkutan, aspek hukum ketenagakerjaan, aspek hukum kemitraan, aspek hukum perlindungan konsumen, aspek hukum perdata</p> <p>Terkait risiko yang terjadi terhadap penumpang masih sebatas tanggung jawab pribadi antara kedua belah pihak yaitu driver dan PT. Gojek upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kegiatan usaha ojek berbasis aplikasi online yang pertama substansi hukum yang kedua dari struktur hukum yang ketiga struktur budaya masyarakat.</p>
--	------------------	---	---	--

Pada penelitian sebelumnya objek penelitian terletak pada penyelenggaraan angkutan berdasarkan ”UU No 22 tahun 2009 tentang UU LLAJ uber dengan grabcar tidak berkedudukan sebagai perusahaan penyelenggara angkutan umum karena keduanya tidak memiliki izin berdasarkan pasal 173 ayat (1) UU LLAJ.” Dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa uber dan grab car berdasarkan pasal 189 UU LLAJ. dan tanggung jawab pribadi antara driver dengan PT Gojek tersebut. Sementara penelitian penulis pada saat ini



berfokus pada perlindungan melalui asuransi penumpang transportasi sewa khusus dan perlindungan konsumen terhadap transportasi sewa khusus berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang transportasi sewa khusus atas adanya risiko kecelakaan di tinjau dari kedudukan penumpang sebagai konsumen menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab Pelaku Usaha Transportasi Sewa Khusus atas adanya risiko kecelakaan pada penumpang menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi penumpang transportasi sewa khusus atas adanya risiko kecelakaan di tinjau dari kedudukan penumpang sebagai konsumen jasa transportasi sewa khusus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha jasa Transportasi Sewa Khusus atas adanya risiko kecelakaan di tinjau dari kedudukan konsumen sebagai pelaku usaha jasa transportasi sewa khusus menurut undang-undang perlindungan konsumen

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat pengembangan keilmuan di bidang Hukum Perdata secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. Selain itu, di harapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Dalam penelitian ini diharapkan menambah wawasan penulis mengenai perlindungan terhadap penumpang transportasi sewa khusus ojek yang berbasis aplikasi online (uber) terhadap risiko kecelakaan

#### **b. Bagi Perusahaan**

Dalam penelitian ini di harapkan Sebagai menambah masukan terhadap perusahaan ojek yang berbasis aplikasi online PT. Uber untuk terus melakukan perbaikan khususnya di bidang asuransi

#### **c. Bagi Pemerintah**

Dalam penelitian ini di harapkan menjadi bahan referensi bahan referensi dan informasi tambahan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan asuransi terhadap pengguna jasa (penumpang) ojek yang berbasis aplikasi online (uber)



**d. Bagi Masyarakat**

Dalam penelitian ini di harapkan bahwa Setiap bahan informasi untuk masyarakat pada umumnya, dan di harapkan dapat memberi pemahaman dari segi perlindungan konsumen dan asuransi terhadap pengguna jasa ojek yang berbasis aplikasi (online).

**e. Bagi Peneliti Berikutnya**

Dalam penelitian ini di harapkan Sebagai Bahan Pertimbangan atau dapat di kembangkan lebih lanjut, serta referensi untuk peneliti sejenis.

**E. Sistematika Penulisan**

**Bab 1: Pendahuluan**

Pada bab ini berii tentang latar belakang masalah, orisinalitas penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis dan secara praktis bagi penulis, yaitu bagi penulis, bagi pemerintah, bagi masyarakat dan bagi peneliti berikutnya.

**Bab II: Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini berisi teori dan pendapat para ahli yang berasal dari referensi yang sahih atau akurat maupun hasil penelitian yang telah di uji kebenarannya sehingga nantinya dapat di gunakan sebagai bahan analisis kajian ini berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi.

**Bab III: Metode Penelitian**

Pada bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum dan sumber-sumber

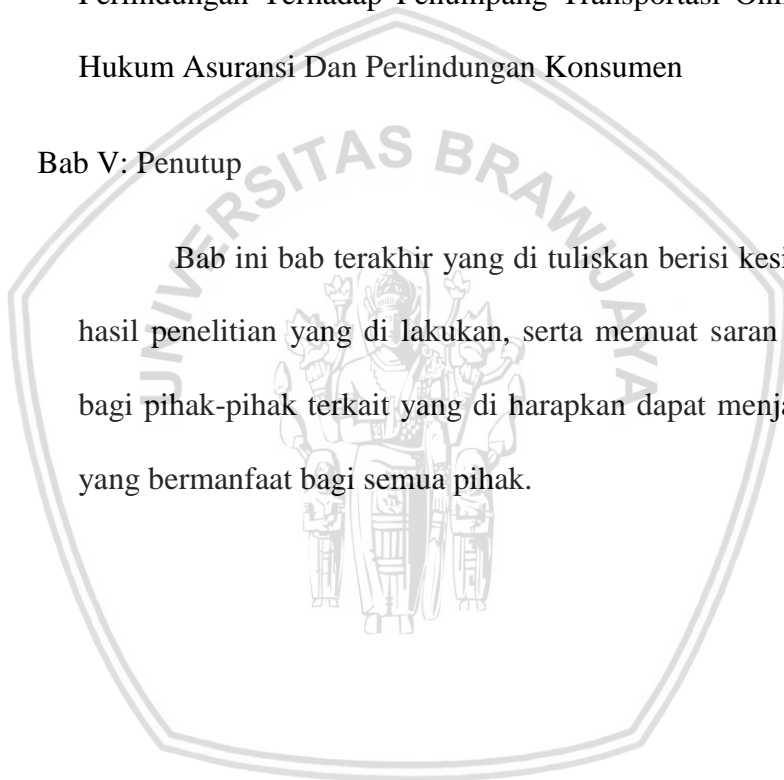
hukum yang di gunakan oleh peneliti dalam menguraikan mengenai teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi koneptual.

#### Bab IV: Hasil Penelitian

Menjelaskan mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang terkait dengan dengan judul yang peneliti ambil yaitu Perlindungan Terhadap Penumpang Transportasi Online Menurut Hukum Asuransi Dan Perlindungan Konsumen

#### Bab V: Penutup

Bab ini bab terakhir yang di tuliskan berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang di lakukan, serta memuat saran dari penulis bagi pihak-pihak terkait yang di harapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Perlindungan Hukum

“Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang di berikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat represif maupun yang bersifat preventif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu ketertiban, keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.”<sup>15</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon

“Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.”

Menurut Satjipto Raharjo “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.”<sup>16</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori “perlindungan hukum salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan terhadap hanya dapat dilakukan

---

<sup>15</sup> Rahayu, 2009, **Pengangkutan Orang**, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 **Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat** Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 **Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, **Sisi lain dari Hukum di Indonesia**, Jakarta, Kompas, 2003, hal. 121

dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu di atur dan di lindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum muncul dari suatu ketentuan hukum dan semua peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang di anggap mewakili kepentingan masyarakat.”<sup>17</sup>

## 2. Tinjauan Tentang Transportasi

### 2.1 Pengertian Transportasi

Dalam kegiatan sehari-hari kata pengangkutan sering disebut dengan kata “Transportasi”. Pengangkutan lebih menekankan kepada aspek yuridis sedangkan transportasi lebih menekankan pada aspek kegiatan perekonomian, akan tetapi keduanya memiliki definisi yang sama. Secara Harfiah Transportasi ialah perpindahan barang/manusia dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang di gerakan oleh manusia atau mesin. Transportasi di gunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Menurut pendapat bowersox (1981) menyatakan:

“transportasi merupakan perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dimana suatu produk di pindahkan ke tempat tujuan yang di butuhkan dan secara umum transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan barang dari suatu tempat kempat ke tempat yang lain baik dengan atau tanpa sarana.”

### 2.2 Pengertian Transportasi Online

---

<sup>17</sup>Sadjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 54

Online merupakan sebuah jaringan internet untuk melakukan segala bentuk kegiatan yang dapat di lakukan secara online misalnya mencari berita, bisnis dan lain sebagainya, online juga bisa di gunakan sebagai alat komunitas dan juga alat informasi.

Transportasi online adalah salah satu perusahaan transportasi yang merupakan suatu aplikasi penghubung antara pengemudi (driver) dengan pelanggan agar mempermudah pemesanan dan pembayaran. Dan telah di atur dalam Permenhub pasal 26 yang menyatakan:

“angkutan sewa khusus sebagaimana di maksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah oprasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.”

Transportasi darat di daerah perkotaan membutuhkan suatu sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk melayani pemindahan manusia dan barang-barang dalam batas antar wilayah, sehingga berbagai sumber daya yang ada bisa di peroleh dan di manfaatkan untuk kepentingan manusia. Khususnya mengenai pemindahan barang-barang, kualitas jasa transportasi barang harus di lakukan secara efektif dan efisien dengan cara cepat, aman teratur, bertanggung jawab, dan murah.<sup>18</sup>

## 2.2 Jasa Transportasi

Menurut Kotler (2000;486) menyatakan:

”jasa adalah setiap tindakan atau kerugian yang dapat di tawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, produknya dapat di kaitkan atau di kaitkan dengan produk fisik.”

---

<sup>18</sup>Raharjo Adisasmita, **Analisis Kebutuhan Transportasi**, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hal 35

Kehadiran penyedia jasa (driver) transportasi online seperti Go-Jek, Uber mendapat respon positif dari masyarakat luas sekaligus solusi alternatif dalam akses transportasi.

### 2.3 Karakteristik Jasa

Menurut Griffin (1999) dalam Ririn dan Mastuti, (2011:3) terdapat tiga karakteristik jasa, sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. *Intangibility* (tidak berwujud). Jasa tidak dapat di lihat, dirasakan, diraba, di dengar atau di cium sebelum jasa itu di beli.
2. *Unstotability*. Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan produk yang telah di hasilkan. Karakteristik ini juga di sebut *Inseparability* (tidak dapat di pisahkan), jasa di hasilkan dan di konsumsi secara bersamaan.
3. *Customization* atau *Variability*. Jasa si desain khusus yang memiliki berbagai jenis, tipe untuk kebutuhan pelanggan, sebagaimana pada jasa asuransi dan kesehatan.”

## 3. Tinjauan Umum Tentang pengangkutan

### 3.1 Pengertian Pengangkutan

Kata ‘pengangkutan’ bersumber dari kata angkut yang berarti membawa dan mengangkut.<sup>20</sup>“Dalam kamus hukum tercantum bahwa, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.”<sup>21</sup>

Berangkat dari pengertian tersebut pengangkutan dapat di lakukan sendiri oleh pihak pengangkut atau di lakukan oleh orang

<sup>19</sup> Ratnasari, Ririn Tri & Mastuti H. **Akta Manajemen Pemasaran Jasa**. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011 hal 3

<sup>20</sup> <http://kbbi.co.id/arti-kata/transportasi/> diakses pada tanggal 10 maret 2018

<sup>21</sup> Setiawan Widagdo, **Kamus Hukum**, jakarta: PT Prestasi Pustaka, 2012, hal 413

lain atas perintah pengangkut, pengangkut dalam keberlakuannya bukan hanya orang semata melainkan badan usaha juga memiliki wewenang atas perjanjian pengangkutan, berhak menyelenggarakan pengangkutan orang dan atau barang dimana pihak pengangkut ini diwajibkan untuk memikul resiko tentang keselamatan penumpang dan atau barang-barang yang di angkut serta bertanggung jawab atas semua kerugian yang di derita dalam kegiatan pengangkut tersebut.<sup>22</sup>

### 3.1.1 Jenis- Jenis Angkutan

#### 1. Angkutan Sewa Umum

Menurut pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017:

“angkutan sewa umum sebagaimana di maksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf a, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu yang di sediakan dengan cara menyewa kendaraan atau tanpa pengemudi melalui cara borongan berdasarkan jangka waktu tertentu”.

Pelayanan Pada pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 menyatakan:

“Angkutan sewa umum yang di maksud pada ayat (2), wajib memenuhi pelayananan sebagai berikut:

- a. Wilayah oprasi tidak di batasi oleh wilayah administrasi;
- b. Tidak terjadwal;
- c. Pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
- d. Pengguna kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian;
- e. Tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;

---

<sup>22</sup> MadePuri Adnyani Sangging, 1984, **Hukum Pengangkutan**, Fakultas Hukum Universitas Mahasarawati, Denpasar, hal 5



- f. Tujuan perjalanan di tentukan oleh pengguna jasa;
- g. Sewa di lakukan berdasarkan jangka waktu paling lama 6 (enam) jam;
- h. Dan wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang di tetapkan.”

### 3.1.2 Angkutan Sewa Khusus

Pada pasal 26 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108

Tahun 2017 menyatakan:

“Angkutan sewa khusus sebagaimana di maksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah oprasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.”

Pelayanan angkutan sewa khusus menurut pasal 26 ayat (2):

“Angkutan sewa khusus sebagaimana di maksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- a. Beroprasi pada wilayah oprasi yang telah di tetapkan ;
- b. Tidak terjadwal;
- c. Dari pintu ke pintu;
- d. Tujuan perjalanan di tentukan oleh pengguna jasa;
- e. Tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
- f. Penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikan penumpang secara langsung di jalan;
- g. Pemesanan layanan hanya melalui aplikai berbasis teknologi informasi;
- h. Wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang di tetapkan.”

## 3.2 Para Pihak Dalam Transportasi Sewa Khusus

### 3.2.1 Pihak Penumpang

Pengertian penumpang telah di atur dalam pasal 1 butir 25

Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan



Angkutan Jalan yang selanjutnya di singkat (LLAJ) yang menyatakan: “bahwa orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan”.

Menurut Damardjati (1995)

“penumpang adalah setiap orang yang di angkut ataupun yang harus di angkut di dalam pesawat udara ataupun alat pengangkutan lainnya, atas dasar persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan tersebut.”

3.2.2 Penumpang mempunyai kewajiban yang di atur dalam KUHDagang yaitu:

- 1) Wajib membayar upah angkutan dan bagasi yang telah di atur dalam pasal 533a.
- 2) Wajib membayar upah angkutan terlebih dahulu yang telah di atur dalam pasal 553i.

3.2.3 Penumpang mempunyai Hak yang telah di atur dalam KUHDagang yaitu:

1. Apabila terjadi kecelakaan maka penumpang atau ahli warisnya mempunyai hak atas ganti rugi di atur dalam pasal 526a.
2. Dengan menyimpang dari ketentuan dalam pasal 252 dan 256 maka dapat di tuntutan ganti rugi sepenuhnya. Jika kecelakaan di sebabkan oleh penumpang itu sendiri maka perjanjian yang bertentangan dengan ini batal. Di atur dalam pasal 527.

3. Penumpang dapat meminta karcis perjalanan. Diatur dalam pasal 530.

4. Pihak lawan pada perjanjian pengangkutan sebelum perjalanan di mulai, dapat memutuskan perjanjian pengangkutan. dengan pemberitahuan tertulis kepada pengangkut biaya angkutan yang telah dibayar harus dibayarkan kembali, akan tetapi pengangkut mempunyai hak atas ganti rugi yang sekiranya dideritanya karena keputusan itu. KUHperd. 1246 dst.; KUHD 533f, x, 741. Pasal 533g.

#### **4. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen**

##### **4.1 Pengertian Perlindungan konsumen**

Pada Pasal 1 Undang -Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum yang memberi perlindungan terhadap konsumen.”

Kalimat yang berbunyi “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” di harapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan kesewenang-wenangan dan kepastian hukum bagi konsumen.

Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata “*consumer*”(Inggris-Amerika) atau “*consument/konsument*” (Belanda). Secara harfiah kata *consumer* adalah (lawan dari

produsen) setiap orang menggunakan barang, tujuan penggunaan barang atau jasa akan di tentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula bahasa inggris-Indonesia memberi kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>23</sup>

#### 4.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Menurut P.Scholten asas hukum adalah “kecenderungan-kecenderungan yang di syaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.”<sup>24</sup>

Asas hukum dapat di bagi juga menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus.<sup>25</sup>

- a. Asas hukum umum ialah asas hukum yang bersangkutan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas restitution in integrum, asas lex posteriori derogat legi priori, asas bahwa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus di anggap demikian sampai di putus oleh pengadilan.
- b. Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, seperti asas pacta sun servanda, asas konsesualisme, asas yang tercantum dalam pasal 1877 KUHPerdata, asas praduga tak bersalah.

---

<sup>23</sup>Celina Tri siwi Kristiyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika, 2008 hal 22

<sup>24</sup>Sudikno Mertokusomo, **Mengenal Hukum (suatu pengantar)**, Liberty yogyakarta, 2007 hal 34

<sup>25</sup>Ibid., hal. 36

Ada lima asas perlindungan konsumen dalam pasal 2 UUPK :

1. “Asas Manfaat merupakan upaya untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
  2. Asas Keadilan di maksud agar partisipasi dari seluruh rakyat dapat di wujudkan dalam maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dalam melaksanakan kewajibannya secara adil;
  3. Asas Keseimbangan yang di maksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spritual;
  4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang di konsumsi dan di gunakan;
  5. Asas Kepastian hukum yang di maksud agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
- Setiap perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen harus mengacu dan mentaati kelima asas tersebut, karena di junjung tinggi dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen.”

Dalam pasal 3 UUK perlindungan konsumen mempunyai tujuan untuk:

- a. “Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang dan/jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak nya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Menurut Dedi Harianto “Perlindungan konsumen adalah melindungi konsumen dari dampak negatif kekuatan pasar yang cenderung dapat merugikan konsumen serta untuk melindungi hak-hak konsumen”.

Tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan. Adapun tujuan perlindungan konsumen disusun dengan cara bertahap, yaitu mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan tatanan tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan kualitas pelayanan, idealnya, pencapaian tujuan perlindungan dilakukan secara serempak.<sup>26</sup>

## 5. Pelaku Usaha

### 5.1 Perseroan Terbatas

Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menentukan batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.<sup>27</sup> “Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa

---

<sup>26</sup> Wahyu sasongko, **Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum perlindungan Konsumen**, Lampung, universitas bandar lampung, 2007, hal 40-41

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhamad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, cet 4, PT citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 109

perseroan merupakan suatu subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat di bebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cukup melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan. Subjek hukum yang di kenal para ahli ada dua macam yaitu:<sup>28</sup>

- a. Orang Pribadi (Belanda: *naturlijk person* atau Inggris: *natural person*);
- b. Badan Hukum (Belanda: *rechtspersoon* atau Inggris: *legal entity*)”

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang di sebut “*separate patrimony*” yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagi pemilik. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.<sup>29</sup>

## 5.2 Ojek (Driver)

Ojek (driver ) yang beraplikasi online ini bekerjasama dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-jek Indonesia) sebuah perseroan terbatas yang di dirikan dan beroprasi secara sah berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan berdomisili di Indonesia, yang bergerak di bidang aplikasi perangkat seluler dengan merek dagang GO-JEK begitu juga dengan UBER yang bergerak di perusahaan teknolog yaitu PT Uber Teknologi Indonesia.

---

<sup>28</sup> Hardijan Rusli, **Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal 17

<sup>29</sup> Erman Rajagukguk, **Butir-Butir Hukum Ekonomi**, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hal 191

Hak-hak yang harus di penuhi sebagai rekan driver GO-FLEET yaitu:<sup>30</sup>

1. Driver indivivu atau non GO-FLEET partner mempunyai hak mendapatkan pelayanan yang selayaknya pada umumnya.
2. Driver mempunyai hak mendaftarkan diri dan/atau mengundurkan diri dari GO-FLEET Partner.
3. Dan mempunyai hak mendapatkan benefit atau keuntungan tambahan yang di tawarkan atau di sediakan oleh GO-FLEET Partner.

Kewajiban dari Driver GO-FLEET yaitu:<sup>31</sup>

1. wajib mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan selayaknya driver individu atau non GO-FLEET partner pada umumnya.
2. Wajib menandatangani surat keterangan kerja bermaterai dengan GO-FLEET partner.
3. Wajib menjalankan seluruh peraturan dan ketentuan yang telah di sepakati dengan GO-FLEET, sebaiknya melalui surat keterangan kerja tertulis.

## 6. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab merupakan suatu kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.

---

<sup>30</sup> **Hak dan Kewajiban Driver GO-FLEET**  
<https://driver.go-car.co.id/hc/id/articles/360001693827-Hak-dan-Kewajiban-Driver-GO-FLEET> di akses pada tanggal 13 juli 2018

<sup>31</sup> Ibid



Dalam kamus hukum, tanggung jawab melahirkan suatu kewajiban bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya<sup>32</sup>

Menurut hukum perdata pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu risiko dan kesalahan. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan “(*liability without based on fault*)” dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan “(*liability without fault*)” yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak “(*strick liability*)”. Prinsip dasar tanggung jawab atas dasar kesalahan mengandung arti “bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab resiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya”.

Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Secara umum, adapun tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen mempunyai beberapa prinsip-prinsip hukum yang dibedakan sebagai berikut: <sup>33</sup>

1. “Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada Pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara

<sup>32</sup> Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, 2005, Bogor, hal 26

<sup>33</sup> Shidarta, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia**, PT Grasindo, 2000. Jakarta, hal. 59-65



hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab Prinsip ini menyatakan tergugat dianggap selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ada pada si tergugat. Saat ini beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) masih dapat diterima dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Landasan gagasan dari teori pembalikan beban pembuktian adalah “seseorang yang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya”. Hal ini tentu bertolak belakang dengan asas hukum praduga tidak bersalah yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikannya kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat dan tergugat ini harus menghadirkan bukti-bukti, dirinya tidak bersalah.
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*) hanya dikenali dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*) identik dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Dengan begitu ada para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian yang memungkinkan dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya dalam keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen secara umum dapat digunakan untuk menjerat pelaku usaha. Khususnya produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Dalam hal ini, konsumen hanya perlu membuktikan adanya hubungan kasualitas antara perbuatan pelaku usaha dan kerugian yang dideritanya. Selbihnya dapat digunakan prinsip *strict liability*.
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disukai oleh pelaku usaha untuk dicantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.”

## 7. Tinjauan Tentang Asuransi

### 6.1 Pengertian Asuransi

Pengertian Asuransi pasal 1 UU No 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian:

- a. “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- b. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- c. Memberikan pembayaran yang di dasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang di dasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang di dasarkan pada hasil pengelolaan dunia.”

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris , *Insurance*, yang dalam bahasa indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan.<sup>34</sup>

## 1.2 Produk-Produk Asuransi

Produk Asuransi adalah<sup>35</sup>:

- a. “Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang di dapat di asuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau pemberian jaminan pemenuhan kewajiban pihak yang lain apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya;
- b. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih resiko yang terkait dengan meninggalnya seseorang yang di pertanggungkan, hidup dan meninggalnya seseorang yang di pertanggungkan, atau anuitas asuransi jiwa;
- c. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih resiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang di pertanggungkan; dan/ atau
- d. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih resiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.”

<sup>34</sup> Depdikbud, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, balai pustaka, Jakarta, 1996 hal 63

<sup>35</sup> Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Semakin pesatnya perkembangan ekonomi, teknologi, dan pengetahuan modern mengiringi masyarakat agraris ke arah masyarakat modern yang selalu di iringi dengan tingkat kewaspadaan yang terus meningkat dalam segala bidang, bisnis, sosial, politik atau interaksi lainnya. Asuransi telah menjadi suatu bagian usaha yang berkembang dengan pesat karena di rasakan banyak memberi manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat. Manfaat yang paling utama adalah berupa rasa nyaman karena aset yang di anggap berharga telah di tanggung atau di jamin kerugiannya jika suatu resiko menyimpannya.<sup>36</sup>

Selain itu asuransi juga telah menjadi suatu kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia berbagai ragam produk asuransi yang di tawarkan oleh suatu perusahaan asuransi. dalam hal berbisnis, setiap orang pribadi atau badan hukum tidak ingin menanggung resiko berat apalagi resiko tersebut sampai pada kondisi yang dapat merugikan atau membebani kelancaran kehidupannya.<sup>37</sup>

### 1.3 Jenis-Jenis Asuransi

Menurut Abdulkadir Muhammad, “asuransi dapat diklarifikasikan menurut berbagai kriteria yang dapat di tinjau dari segi ketentuan undang-undang yang mengaturnya”:

#### a. “Menurut Sifat Perikatannya

##### 1. Asuransi Sukarela

<sup>36</sup> Risiko adalah suatu ketidakpastian yang akan datang tentang kerugian. Di kutip dari Sri Rejeki Hartono, **Hukum asuransi dan perusahaan asuransi**, cet ke 4 Jakarta, sinar Grafika, 2001 hal 62

<sup>37</sup> Abbas salim, **Asuransi dan Menejemen Risiko**, Edisi 2, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007 hal 9

Asuransi sukarela adalah asuransi secara bebas tanpa ada paksa yang di lakukan antara penanggung dan tergugat sesuai dengan perjanjian secara sukarela. Contohnya: asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

## 2. Asuransi Wajib

Asuransi wajib adalah asuransi yang di tentukan oleh pemerintah bagi warganya yang bersifat wajib dan di tentukan oleh undang-undang, salah satunya adalah asuransi sosial.

### b. Menurut Jenis Risiko

#### 2. Asuransi risiko perseorangan

Asuransi risiko perseorangan adalah asuransi yang bergerak di bidang perlindungan terhadap individu, risiko pribadi dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti misalnya: Rumah Pribadi

#### 3. Asuransi Risiko Usaha

Asuransi risiko usaha adalah asuransi yang bergerak di bidang perlindungan terhadap usaha dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti berkaitan dengan risiko usaha yang mungkin di hadapi, misalnya: armada angkutan, gedung, pertokoan.

### c. Menurut Jenis Usaha

#### 1. Asuransi kerugian

Asuransi kerugian adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap harta kekayaan dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti, misalnya; asuransi kebakaran,

asuransi tanggung gugat, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kredit.

## 2. Asuransi jiwa

Asuransi jiwa adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari ancaman bahaya kematian, misalnya: asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa, berjagka, asuransi jiwa seumur hidup

## 3. Reasuransi

Reasuransi adalah asuransi kepada pihak ketiga atau asuransi ulang, dikarenakan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa tidak ingin menanggung risiko yang terlalu berat.

## 4. Asuransi Sosial

Asuransi sosial sama dengan asuransi jiwa. Tetapi penyelenggaraan asuransi ini berdasarkan pada peraturan perundangan tersendiri yang bersifat wajib dan di dalamnya terkandung tujuan-tujuan tertentu dari pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat atau sebagian anggota masyarakat. Asuransi sosial juga harus meningkatkan kinerja kerja untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.”

## 8. Tinjauan Tentang Risiko

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian, ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (uncertain) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut Wideman, ketidak pastian



yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (opportunity), sedangkan ketidak pastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko (risk). Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang merugikan.

## 9. Tinjauan tentang ganti rugi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmentnya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya. KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan.
2. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Misalnya rumah yang baru diserahkan oleh pemborong ambruk karena salah konstruksinya, hingga merusak perabot rumah.

---

<sup>38</sup> Munir Fuady, **Konsep Hukum Perdata**, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hal 223

3. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Misalnya, dalam hal jual beli barang, jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. *Hoge Raad* berpendapat, bahwa penggantian “ongkos, kerugian, dan bunga” harus dituangkan dalam sejumlah uang tertentu. Namun jangan menjadi rancu kreditur bisa saja menerima penggantian *in natura* dan membebaskan debitur. Yang tidak dapat adalah bahwa debitur menuntut kreditur agar menerima ganti rugi dalam wujud lain dari pada sejumlah uang.

Ganti rugi yang di atur dalam 1243 KUHPerdara :

“ Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yang berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum, dimana metode penelitian merupakan cara yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang akan dihadapi. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien.<sup>39</sup>

Berdasarkan Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis bahwa penelitian ini mengidentifikasi masalah perlindungan terhadap penumpang transportasi sewa khusus. Sehingga, untuk menganalisis masalah dan memberikan pemecahan rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses yang tujuannya itu untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang terjadi serta agar dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis

---

<sup>39</sup> Soerjono dan Abdurrahman **Metode Penelitian Hukum**, Rinek Cipta, Jakarta, 2003, hal 45.

normatif, karena ingin melakukan *reintegrasi*<sup>40</sup> agar memastikan tidak terulangnya peristiwa yang dimana penumpang tidak mendapatkan asuransi santunan atas cedera yang di alami penumpang saat menaiki ojek yang berbasis aplikasi. Dan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat (2).“Reintegrasi adalah suatu metode pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru agar serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan”.<sup>41</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan beberapa macam pendekatan, sebagai berikut:

### a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang di pakai dalam menyelesaikan penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan sebab peraturan perundang-undangan menjadi titik fokus peneliti dalam menyusun penelitian ini. Peneliti juga menganalisis berbagai jenis peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yaitu undang-undang nomor 8 tahu 1999 dan undang-undang sistem jaminan sosial nasional yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2004.

Dan terjadi kekosongan hukum dalam Peraturan Menteri Nomor 108 tahun 2017 dalam pasal 44 hanya mengatur asuransi terhadap angkutan umum saja sedangkan angkutan sewa khusus tidak mengatur tentang asuransi.

---

<sup>40</sup> Soekanto **Reintegrasi** bertujuan untuk mengembalikan keadaan yang di inginkan sesuai dengan persatuan dan keutuhan masyarakat

<sup>41</sup> Soerjono soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, jakarta; PT Raja Grafindo Persada 2013, hal 293

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### 1. Jenis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini menggunakan beberapa jenis bahan hukum yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yang di olah dalam penelitian hukum normatif adalah jenis bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan primer dalam penelitian ini adalah undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan Peraturan Menteri perhubungan Nomor 108 tahun 2017.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua jenis publikasi tentang bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yakni buku-buku literatur, hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti, teori atau pendapat ahli yang berkompeten dan kamus hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu kamus bahasa indonesia, kamus ilmiah populer, serta tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh penulis.

#### 2. Sumber Bahan Hukum

Peneliti menggunakan sumber bahan hukum dari berbagai hal yang terkait dengan permasalahan yang ada, sumber bahan hukum tersebut di peroleh dari:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang;
- b. Pusat Dokumentasi Ilmu hukum (PDIH);
- c. Perpustakaan Umum Kota Malang;
- d. Penelusuran pustaka pribadi;
- e. Penelusuran situs-situs internet

#### **D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik penelusuran dalam pengumpulan bahan hukum yang di gunakan oleh peneliti, studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen yang dilakukan dengan mempelajari serta mencatat data dari bahan pustaka yang telah di kumpulkan, setelah di lakukan pengumpulan, maka peneliti akan menganalisis serta mengambil kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah.

#### **E. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Teknik analis bahan hukum yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, meliputi:

##### **1. Interpretasi Gramatikal**

Interpretasi gramatikal adalah suatu cara penafsiran yang sangat sederhana untuk mengetahui terkait dengan makna ketentuan undang-undang dengan cara menguraikan menurut bahasa sehari-hari yang menjadi acuan.

2. Interpretasi Sistematis adalah suatu metode untuk menafsirkan ketentuan suatu peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkan dengan peraturan perundang-



undangan yang lain. Penafsiran ini dapat di katakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan sebagai terlepas dari perundang-undangan yang lain, suatu peraturan itu haruslah memiliki hubungan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain.

## **F. Definisi Konseptual**

### **1) Pengguna Jasa Transportasi sewa khusus**

Merupakan pengguna jasa atau konsumen yang memesan ojek yang berbasis aplikasi online untuk membantu perjalanan penumpang atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kegiatan Uber dan Go-jek merupakan penyedia Aplikasi Jasa Transportasi yang Berbasis Teknologi. Yang cara pemesanannya hanya dapat di lakukan melalui aplikasi Go-JEK atau UBER di *smartphone*.

### **2) Asuransi**

Asuransi adalah suatu pertanggung jawaban aplikasi yang berbasis online dengan pengguna atau penumpang yang mengalami cidera atas kecelakaan yang di alaminya setelah menumpangi ojek yang berbasis aplikasi online tersebut.

### **3) Perlindungan konsumen**

Merupakan perlindungan bagi pengguna atau penumpang ojek yang berbasis aplikasi online jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

#### 4) Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya di sebut perseroan, adalah badan hukum, yang merupakan persekutuan modal, di dirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang di tetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Transportasi Sewa Khusus Atas Adanya Risiko Kecelakaan

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum ialah segala upaya pemenuhan hak dan kontribusi bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan saksi, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian kompensasi, pemberian restitusi, bantuan hukum, dan pelayanan medis.<sup>43</sup>

Philipus M. Hadjon beranggapan “bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.<sup>44</sup>

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang selalu disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana untuk

---

<sup>43</sup> Soerjono soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1984, hal 133

<sup>44</sup> Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia**, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 1-2

perlindungan hukum ada dua macam yang dapat kita pahami yaitu sarana perlindungan hukum represif dan sarana perlindungan hukum preventif

Menurut Philipus M.Hadjon, “Perlindungan Hukum Preventif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.”<sup>45</sup>“Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dan rambu-rambu dalam melakukan suatu kewajiban”.<sup>46</sup>

Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, adapun subyek hukum yang diberikan yaitu kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendaapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendaapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karenaa dengan perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat lebih hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.,

---

<sup>45</sup> Philipus M.Hadjon, op.cit., hal. 4.

<sup>46</sup> Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003 hal 20

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

### **1. Bentuk Perlindungan Hukum Transportasi Umum Yang Di Atur Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Perlindungan aspek hukum transportasi umum tidak terlepas keefektivitas berlakunya hukum itu sendiri, dengan hadirnya peraturan mengenai penyelenggaraan penggunaan transportasi umum, maka masyarakat merasa terlindungi sebagai pengguna jasa transportasi. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang selanjutnya di singkat LLAJ. Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, serta peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan yang masih berlaku hingga sekarang.<sup>47</sup>

Pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ angkutan jalan merupakan landasan normatif di laksanakannya pengangkutan di indonesia. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus di kembangkan lagi potensinya agar terwujudnya, keamanan, keteriban, dan keselamatan.

---

<sup>47</sup> Tri Puji Astuti, Rinitami Njatrijani, Herni Widanarti, **Asuransi kecelakaan Diri (Personal Accident) Pada PT. Allianz Utama Indonesia Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Go-Jek di wilayah Jakarta**, jurnal, ilmu hukum, universitas diponegoro, hal 3

Aturan asuransi sebagaimana di sebutkan bahwa “perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana di maksud dalam pasal 188<sup>48</sup>”.

Adapun tujuan di selenggarakan berlalu lintas telah di atur dalam UU.diselenggarakan dengan tujuan<sup>49</sup>:

- a. “Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa,
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.”

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum Transportasi Sewa Khusus Yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek**

Seiring berkembangnya *smartphone* (telepon pintar) dengan fitur teknologi aplikasi yang dimiliki untuk menghubungkan pengguna *smartphone* ke internet. Mendorong perkembangan teknologi aplikasi sehingga saat ini di manfaatkan sebagai bisnis. Teknologi yang berbasis aplikasi ini merupakan hasil kreativitas para pelaku usaha untuk berbisnis yang menciptakan teknologi berbasis aplikasi untuk menghubungkan masyarakat atau pengguna aplikasi dan pelaku usaha.

---

<sup>48</sup> pasal 189 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>49</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Transportasi online adalah “salah satu contoh pengembangan teknologi berbasis aplikasi disambut cukup baik di awal kemunculannya karena dianggap sebagai salah satu inovasi terbaik saat ini”.<sup>50</sup>

Menurut Endang Wahyusetyawati dalam naskahnya “Transportasi sewa khusus atau biasa disebut transportasi online muncul di tengah kondisi sistem transportasi di Indonesia yang belum tertata dengan baik. Beberapa perusahaan besar berlomba untuk membentuk perusahaan transportasi berbasis aplikasi online, beberapa di antaranya ialah GO-JEK dan UBER. Bagi sebagian orang transportasi online merupakan solusi atas sistem transportasi yang masih buruk, namun di sisi lain merupakan masalah bagi orang-orang yang menggantungkan hidup dari jasa transportasi yang tidak mengandalkan teknologi.

Transportasi sewa khusus ini menawarkan kemudahan, biaya yang lebih murah, kenyamanan dan keamanan yang lebih terjamin, maka tidak mengherankan jika banyak orang yang beralih dari modal transportasi konvensional ke modal transportasi sewa khusus, atau biasa disebut transportasi online.

Seiring dengan waktu, kehadiran transportasi online ini menimbulkan kecemburuan sosial bagi transportasi konvensional yang sudah ada sebelumnya baik bus, ojek, taksi, dan lain sebagainya.” Transportasi sewa khusus ini di tuduh sebagai dalangnya penurunan pendapatan para *driver*/pengemudi

---

<sup>50</sup> Endang Wahyusetyawati. **Dilema Pengaturan Transportasi Online**, Jurnal, Reclaiming online, hal 3

transportasi konvensional. Fenomena transportasi *online* di Indonesia telah ramai dibicarakan masyarakat, karena dalam beberapa waktu lalu ada penolakan dari angkutan umum dan ojek pangkalan terhadap transportasi online. Karena transportasi online lebih murah, mudah dan untuk mendapatkannya dengan cara mendownload aplikasinya. Ribuan pengemudi angkutan konvensional menggelar aksi demonstrasi dan mogok kerja dari beberapa kota. Karena dengan adanya transportasi online banyak masyarakat yang beralih dari transportasi konvensional menjadi transportasi online.

Kemudian status hukum transportasi sewa khusus guna untuk mengisi kekosongan hukum pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016 dan di revisi peraturan menteri perhubungan nomor 26 tahun 2017 dan di revisi lagi peraturan menteri perhubungan nomor 108 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek selanjutnya disingkat PM 108 tahun 2017. Aturan transportasi sewa khusus diatur dalam pasal 26 ayat 1 yang berbunyi: “angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi”.

Terlepas dari peraturan menteri ada tanggung jawab pelaku usaha terhadap kecelakaan terhadap penumpang. Akan tetapi di PM 108 tahun 2017 hanya mengatur tentang asuransi bagi angkutan umum. Pemerintah merumuskan PM Nomor 108 Tahun 2017 berdasarkan tiga landasan yaitu:<sup>51</sup>

1. “Kepentingan nasional yang berada di atas segalanya.
2. Kepentingan pengguna jasa dalam hal aspek keselamatan dan perlindungan konsumen seperti aturan yang mengatur tentang asuransi.
3. Kesetaraan dalam kesempatan berusaha.”

### **3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Transportasi Sewa Khusus Yang Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Perlindungan hukum bagi penumpang adalah suatu permasalahan yang besar dengan persaingan global yang terus berkembang sehingga perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan global. Pada Pasal 192 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang”.

Kepastian hukum menjamin kepada konsumen dalam hal ini adanya kekurangan dari perjanjian yang telah disepakati dan telah dipertegas dalam undang-undang perlindungan konsumen

---

<sup>51</sup>Kementerian Perhubungan Republik Indonesia  
<http://dephub.go.id/post/read/pm-108-tahun-2017---payung-hukum-taksi-berbasis-aplikasi> di akses pada tanggal 30 juli 2018

berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen berdasarkan perundang-ndangan adalah “segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa sehingga sampai kepada akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa.<sup>52</sup> Berkaitan dengan pengguna jasa transportasi sewa khusus, yang di atur dalam pasal 8 ayat (1) butir a Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa “Pelaku usaha di larang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan perundang-undangan”. Konsumen memiliki “hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Seringkali tidak di sadari bahwa dalam sistem kehidupan ini sebenarnya setiap manusia pada hakekatnya adalah bertindak sebagai konsumen.<sup>53</sup> Dalam lingkup pembicaraan hukum dan teknologi, aspek hukum perlindungan konsumen sepatutnya adalah fokus perhatian yang sangat penting dalam melihat sejauh mana

---

<sup>52</sup> Zulham, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta. Kencana. 2013. Hal 22

<sup>53</sup> Edmond Cahn, “**Law in Consumer Perspective**,”University of Pennsylvania Law Review, 112 (1963), p.1-27. Dalam AAG. Peters (ed), **Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum**, Bukum III, (Jakarta: Sinar Agape Press, 1990). Hal 142-157.

efektivitas perkembangan dan penerapan teknologi tersebut di tengah masyarakat.<sup>54</sup>

Perlindungan hukum bagi konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen yang secara garis besar dapat di bedakan atau di bagi menjadi 3 (tiga) hak dasar bagi konsumen, yaitu:<sup>55</sup>

1. “Hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar.
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang di hadapi”.

Hak pengguna jasa angkutan transportasi sewa khusus tidak terbatas dengan mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan tetapi juga di rumuskan dalam kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan merupakan bagian dari hak konsumen yang harus di penuhi.<sup>56</sup>

- a. “beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

---

<sup>54</sup> Edmon Makarim, **Kompilasi Hukum Telematika**, Ed 1 Cet 2 Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2004 hal 309

<sup>55</sup> Abdul Halim Barkatullah **Hak-Hak Konsume**, Bandung. Nusa Dua 2010 hal 25

<sup>56</sup> pasal 7 UU No 8 Tahun 1999 Tentang **Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau di perdagangan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang di buat dan/atau yang di perdagangan.
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan, pemanfaatan barang dan/atau yang di perdagangan.
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima atau di dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

### 3.1 Kedudukan Penumpang Transportasi Sewa Khusus Sebagai

#### Konsumen Jasa Transportasi

Konsumen ialah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Konsumen ada dua jenis yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen antara merupakan konsumen yang menggunakan suatu produk, sedangkan Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.<sup>57</sup>

Menurut Janus Sidabalok hak konsumen di bagi menjadi tugas macam yaitu:<sup>58</sup>

- 1) “Hak manusia karena kodratnya, yaitu hak yang di peroleh sejak lahir, contohnya hak untuk hidup, hak ini tidak boleh di ganggu gugat oleh negara, dan bahkan negara wajib menjamin sepenuhnya.
- 2) Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang di berikan oleh negara kepada warga negaranya, hak ini juga di sebut sebagai hak hukum, misalnya hak untuk memberi suara dalam pemilu.
- 3) Hak yang lahir dalam hubungan kontraktual. Hak ini di dasarkan pada perjanjian/kontrak antara satu orang dengan orang yang lain.

<sup>57</sup><http://www.jurnalhukum.com/pengertian-konsumen/> di akses tanggal 25 juli 2018

<sup>58</sup> ibid



Misalnya perjanjian jual beli. Hak pembeli untuk menerima barang dan hak penjual untuk menerima uang.”

Transportasi sewa khusus atau biasa yang di sebut transportasi *online* ini dimana penumpangnya sebagai konsumen. Konsumen terdiri dari mereka yang menggunakan barang atau jasa untuk tujuan membuat barang atau jasa lain atau menggunakan jasanya. Konsumen merupakan salah satu pihak dalam hubungan dan transaksi ekonomi yang haknya sering diabaikan oleh para pelaku usaha. Menurut pasal 1 angka 2 UUPK, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Dalam hal ini pengguna transportasi sewa khusus merupakan setiap orang pemakai jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.

Syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi GO-JEK telah di atur dengan mengunduh, memasang, dan/atau menggunakan Aplikasi GO-JEK ("Aplikasi"), adapun bunyi dari ketentuan pengguna aplikasi sebagai berikut:

“Anda setuju bahwa Anda telah membaca, memahami dan menerima dan menyetujui Ketentuan Penggunaan ini. Ketentuan Penggunaan ini merupakan suatu perjanjian sah antara Anda dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Layanan dan Aplikasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berlaku pada kunjungan dan penggunaan Anda pada situs web kami di [www.GO-JEK.com](http://www.GO-JEK.com) (Situs web)”.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Lampiran Sarat Dan Ketentuan GO-JEK <https://www.go-jek.com/terms-and-condition/> di akses pada tanggal juli 2018

Dalam hal ini kata “anda” yang di maksud dalam ketentuan pengguna adalah orang yang mengunduh atau orang yang memakai aplikasi tersebut.

Dalam ketentuan penggunaan GO-JEK ada tanggung jawab, batasan tanggung jawab, dan ganti rugi terhadap pengguna (penumpang).

Adapun bunyi tanggung jawab dari PT GO-JEK ialah:<sup>60</sup>

1. “Kami tidak bertanggung jawab atas setiap cedera, kematian, kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh perilaku dari para Penyedia Layanan. Kami juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan, termasuk pelanggaran lalu lintas, atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh Penyedia Layanan selama pelaksanaan Layanan. Penyedia Layanan hanya merupakan mitra kerja kami, bukan pegawai, agen atau perwakilan kami.
2. Namun, kami peduli akan keselamatan pengguna Aplikasi dan, atas pertimbangan pribadi semata dan sepenuhnya, kami bersedia untuk memberikan bantuan keuangan jika pengguna mengalami kecelakaan, menderita cedera atau meninggal saat dijemput oleh Penyedia Layanan. Bantuan kami hanya berlaku sejak pengguna dijemput oleh Penyedia Layanan sampai pengguna mencapai tujuannya. Mohon mengingatkan Penyedia Layanan jika anda merasa tidak nyaman dengan cara Penyedia Layanan menyediakan layanan transportasi. Jumlah bantuan keuangan akan ditentukan berdasarkan kebijakan kami.
3. Kami juga bersedia untuk memberikan bantuan keuangan sampai dengan Rp 10.000.000 atas pertimbangan pribadi dan mutlak kami untuk barang yang hilang atau rusak saat menggunakan layanan dari Penyedia Layanan sepanjang barang tersebut mematuhi Ketentuan Penggunaan. Kami tidak memiliki asuransi untuk barang yang dikirimkan dan oleh karena itu jika anda ingin barang tersebut diasuransikan selama pengiriman, silakan anda menghubungi penyedia asuransi anda.
4. Kami menggunakan cara-cara teknis dan keamanan yang tepat dan wajar untuk menjaga Aplikasi aman dan terbebas dari virus dan kesalahan. Namun demikian, bagaimanapun efektifnya teknologi ini, tidak ada sistem

---

<sup>60</sup> ibid

keamanan yang tidak dapat ditembus. Oleh karena itu kami tidak dapat menjamin keamanan database kami dan kami juga tidak dapat menjamin bahwa informasi yang anda berikan tidak akan ditahan/terganggu saat sedang dikirimkan kepada kami.

5. Aplikasi ini dapat mengalami keterbatasan, penundaan, dan masalah-masalah lain yang terdapat dalam penggunaan internet dan komunikasi elektronik, termasuk perangkat yang digunakan oleh anda atau Penyedia Layanan rusak, tidak terhubung, berada di luar jangkauan, dimatikan atau tidak berfungsi. Kami tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kegagalan pengiriman, kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh masalah-masalah tersebut”

Dalam hal tanggung jawab PT GO-JEK, sebenarnya PT. GO-JEK tidak bertanggung jawab atas cedera, kematian, maupun kerugian yang di sebabkan oleh perilaku penyedia jasa karena hubungan PT GO-JEK dengan driver hanya sebatas perjanjian Kemitraan. Akan tetapi PT GO-JEK akan memberikan bantuan keuangan sampai dengan 10.000.000. dengan pertimbangan pribadi PT. GO-JEK.

Pembatasan tanggung jawab Uber terhadap pengguna yaitu uber tidak bertanggungjawab atas kerugian tidak langsung, insidental, khusus, tambahan, konsekuensial, termasuk kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan, kewajiban. Jumlah kewajiban uber kepada anda sehubungan dengan layanan untuk semua kerusakan, kerugian, dan dasar tuntutan tidak boleh melebihi lima ratus euro (€500).<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> persyaratan dan ketentuan uber <https://www.uber.com/id/legal/terms/id/> di akses pada tanggal 8 april 2018

PT. GO-JEK juga mempunyai batasan tanggung jawab, yang berbunyi:<sup>62</sup>

1. “Setiap tuntutan terhadap kami dalam hal apapun oleh anda, akan dibatasi dengan jumlah total yang sebenarnya dibayar oleh dan/atau terhutang pada Anda ketika menggunakan Layanan selama peristiwa yang menimbulkan klaim tersebut. Dalam hal apapun kami dan/atau pemberi lisensi kami tidak akan bertanggung jawab kepada anda atau siapa pun atas biaya, bunga, kerusakan atau kerugian dalam segala jenis atau bentuk (termasuk cedera pribadi, gangguan emosi dan hilangnya data, barang, pendapatan, keuntungan, penggunaan atau keuntungan ekonomi lainnya). Perusahaan dan/atau pemberi lisensinya tidak akan bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau cedera yang mungkin ditimbulkan oleh atau disebabkan oleh anda atau pada setiap orang untuk siapa anda telah memesan Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian, kerusakan atau cedera yang timbul dari, atau dengan cara apapun sehubungan dengan Layanan dan/atau Aplikasi, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan atau ketidak mampuan untuk menggunakan Layanan dan/atau Aplikasi.
2. Anda secara tegas mengesampingkan dan melepaskan kami dari setiap dan semua kewajiban, tuntutan atau kerusakan yang timbul dari atau dengan cara apapun sehubungan dengan Penyedia Layanan. Perusahaan tidak akan menjadi pihak dalam sengketa, negosiasi sengketa antara anda dan Penyedia Layanan. Tanggung jawab untuk keputusan yang anda buat atas Layanan yang ditemukan melalui Aplikasi merupakan tanggung jawab dan melekat seutuhnya dengan dan pada anda. Anda secara tegas mengesampingkan dan melepaskan kami dari setiap dan semua kewajiban, tuntutan, penyebab tindakan, atau kerusakan yang timbul dari penggunaan Layanan, perangkat lunak dan/atau Aplikasi, atau dengan cara apapun terkait dengan Penyedia Layanan yang diperkenalkan kepada anda melalui Aplikasi.
3. Kualitas Layanan yang diperoleh melalui penggunaan Aplikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Layanan yang pada akhirnya memberikan Layanan untuk anda. Anda memahami, oleh karena itu, bahwa dengan menggunakan Aplikasi ini, Anda dapat dihadapkan pada transportasi yang berpotensi berbahaya, ofensif, berbahaya bagi anak di bawah umur, tidak aman

---

<sup>62</sup>ibid

atau tidak pantas, dan bahwa Anda menggunakan layanan atas risiko anda sendiri”.

Dalam batasan tanggung jawab PT GO-JEK setiap tuntutan apapun dari pengguna GO-JEK terhadap PT-GO-JEK akan di batasi dengan jumlah total yang sebenarnya. Perusahaan tidak akan menjadi pihak dalam sengketa, negosiasi sengketa antara *driver* dengan pengguna jasa transportasi sewa khusus (penumpang).

Adapun ketentuan ganti rugi dari PT. GOJEK yang berbunyi:

“Dengan menggunakan Aplikasi ini, anda (pengguna) setuju bahwa anda akan membela, memberikan ganti rugi dan membebaskan kami, pemberi lisensi, afiliasi, dan masing-masing dari petugas, direktur, komisaris, karyawan, pengacara dan agen kami dari dan terhadap setiap dan semua klaim, biaya, kerusakan, kerugian, kewajiban dan biaya (termasuk biaya dan ongkos pengacara) yang timbul dari atau sehubungan dengan: (a) penggunaan Layanan dan/atau Aplikasi oleh anda, hubungan anda dengan Penyedia Layanan, penyedia pihak ketiga, mitra, pemasang iklan dan/atau sponsor, atau (b) pelanggaran atas atau tidak dipatuhinya salah satu Ketentuan Penggunaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang disebutkan di sini atau tidak atau (c) pelanggaran anda terhadap hak-hak pihak ketiga, termasuk Penyedia Layanan pihak ketiga yang diatur melalui Aplikasi, atau (d) penggunaan atau penyalahgunaan Aplikasi. Kewajiban pembelaan dan pemberian ganti rugi ini akan tetap berlaku walaupun Ketentuan Penggunaan dan penggunaan Situs oleh anda telah berakhir”.

Dengan ini dapat di simpulkan bahwa PT GO-JEK indonesia tidak memberi asuransi bagi pengguna (penumpang) jika terjadi kecelakaan. Dan PT GO-JEK “tidak bertanggung jawab atas setiap cedera, kematian, kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh perilaku dari para Penyedia Layanan. PT GO-JEK tidak bertanggung jawab atas kesalahan, termasuk pelanggaran lalu

lintas, atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh Penyedia Layanan selama pelaksanaan Layanan.” Untuk perlindungan asuransi terhadap pengguna transportasi sewa khusus, seharusnya transportasi sewa khusus menerapkan asuransi kepada pengguna jasa transportasi sewa khusus sebagai operator jasa angkutan. Transportasi sewa khusus bertanggung jawab melindungi konsumen yang menggunakan transportasi sewa khusus, karena pengguna telah membayar dan imbalannya sebagai penanggung jawab harus memberikan kompensasi kepada pengguna transportasi sewa khusus (penumpang).

Disisi lain GO-JEK dan UBER mempunyai keunggulan yang baik dari pada transportasi konvensional lainnya. Di tengah era yang menuntut segalanya serba instan dan cepat layanan yang berbasis aplikasi ini merupakan langkah yang cerdas yang bisa diambil menyiasatinya di berbagai bidang. Terlebih soal harga dan metode pembayaran lebih mudah. Dimana penumpang tidak perlu mengeluarkan uang cash untuk membayar Uber menawarkan pembayaran melalui kartu kredit.<sup>63</sup> Taksi Uber sendiri menawarkan kenyamanan taksi dengan harga rendah dan cukup bersaing dengan taksi konvensional.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Dua keunggulan Uber yang tidak dimiliki oleh layanan lain <https://techno.okezone.com/read/2015/09/12/207/1212997/dua-keunggulan-uber-yang-tak-dimiliki-layanan-lain> di akses pada tanggal 9 april 2018

<sup>64</sup> Fenomena Uber dan Implikasi Pajak di Indonesia [https://www.kompasiana.com/tbrights/fenomena-uber-dan-implikasi-pajak-di-indonesia\\_55b382aeef92734409f7645e](https://www.kompasiana.com/tbrights/fenomena-uber-dan-implikasi-pajak-di-indonesia_55b382aeef92734409f7645e) di akses pada tanggal 9 april 2018



Adapun perbedaan antara transportasi konvensional dengan transportasi sewa khusus atau biasa disebut dengan transportasi online:<sup>65</sup>

**Tabel 2**  
**Perbedaan transportasi konvensional dengan transportasi online**

No	Ruang Lingkup	Penyedia Aplikasi Transportasi (Gojek dan Uber)	Penyedia Transportasi Umum (Ojek, Angkot, Taksi)
1	Bentuk badan hukum	Perseroan Terbatas	Perseroan Terbatas
2	Di atur dalam	Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek	Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan
3	Tarif	Kepastian tarif yang harus di bayar oleh konsumen saat memesan	Berdasarkan argo dan rupiah per km. Argo itu saat pintu di buka kalau jalan macet tarifnya bertambah.
4	Pelayanan dan Keamanan	Sebelum di jemput kita sudah tahu nama driver dan plat nomornya	Lebih aman karena ada perusahaan yang mengelolah taksi tersebut
5	Tampilan Kendaraan	Memakai kendaraan pribadi atau rental, maka tidak terkesan sebagai angkutan umum	Terlihat sebagai angkutan umum
6	Investasi dan Keuangan	Tidak membutuhkan modal yang besar karena memakai kendaraan sendiri dan bebas dari pajak	Lebih membutuhkan modal yang lebih besar dan membayar pajak
7	Hubungan dengan pelaksanaan usaha (pengemudi)	Hubungan kemitraan, perusahaan menghubungkan konsumen dengan pengemudi untuk kemudian antara keduanya terjadi transaksi dan perusahaan dapat <i>fee</i> sebagai mitra penghubung sesuai kesepakatan	Pengemudi sebagai mitra kerja berdasarkan perjanjian namun ada juga yang berupa hubungan kerja antara pengemudi dan pengusaha berdasarkan UU No 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

<sup>65</sup> Fakta taksi online dengan konvensional

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2689374/5-fakta-taksi-online-vs-konvensional> di akses pada tanggal 9 april 2018

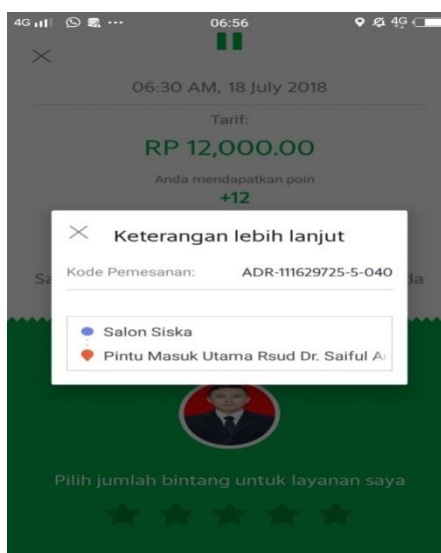


8	Asuransi	Dalam syarat dan ketentuan UBER dan GO-JEK punya batasan tanggung jawab yaitu tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang melibatkan driver GO-JEK maupun UBER	Di atur dalam UU LLAJ pasal 108
---	----------	---	---------------------------------

**sumber: Bahan Hukum Sekunder, Diolah 2018**

Syarat selanjutnya setelah syarat subjektif yaitu syarat objektif, dimana syarat ini berkaitan langsung dengan perjanjian pengangkutan. Pilihan ikon layanan, penentuan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan, tarif, serta pilihan pengemudi (*Driver*) sudah masuk dalam penentuan prestasi atau objek perjanjian pengangkutan. ketika tahapan itu sudah terlewati, saat itu pula hak dan kewajiban perusahaan aplikasi di bidang transportasi dan konsumen atau pengguna jasa transportasi sewa khusus mulai berlaku secara sah.

**Gambar 1. Di ambil pada tanggal 25 juli 2018**





**Gambar 3. Diambil Pada Tanggal 6 Agustus 2018**



Perlindungan yang di berikan oleh perusahaan transportasi sewa khusus yaitu dimana pengguna (penumpang) dapat menambahkan 3 kontak darurat agar dapat berbagi rincian perjalanan penumpang.

### **3.4 Transportasi Sewa Khusus Sebagai Bagian Dari Jasa Yang Di Jual Oleh Perusahaan**

Di indonesia saat ini sudah memiliki beberapa jenis perusahaan transportasi sewa khusus atau biasa yang di sebut transportasi online. Beberapa contoh perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online di Indonesia,yaitu:<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Jasa Transportasi Online yang ada di Inonesia dari Go-Jek hingga Uber

a. Go-Jek

Umumnya aplikasi Go-Jek bekerja dengan mempertemukan penumpang angkutan ojek dengan *driver* ojek yang beroperasi di sekitar wilayah penumpang tersebut. Cukup dengan mengunduh aplikasinya dari *Google Play Store*, maka pengguna dapat memesan jasa layanan tersebut. Adapun tarif angkutan di sesuaikan dengan jarak tempuh yang akan di tuju. Selain jasa angkutan penumpang ada juga jasa antar barang, belanja, dan lain sebagainya.

b. *Grabtaxi*

*Grabtaxi* merupakan aplikasi pemesanan *taxi* berbasis aplikasi, dimana induk perusahaan tersebut berada di Malaysia. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa memesan taksi untuk keperluan antar jemput dengan tarif standar yang di telah tetapkan sesuai argo. Layanan antar jemput bisa lebih cepat karena pemesanan di lakukan melalui aplikasi yang sudah di unduh di *smartphone*.

c. Grabbike

Grabbike Hampir mirip dengan Go-Jek, hanya saja layanan Grabbike belum memiliki layanan antar barang atau belanja. Saat ini Grabbike telah beroperasi di 3 (tiga )kota di kawasan Asia Tenggara yang mengalami persoalan kemacetan, seperti Ho Chi Min City, dan Hanoy di Vietnam, serta di Jakarta.

d. Uber

Merupakan salah satu layanan transportasi berbasis teknologi berpusat di *San Fransisco* Amerika Serikat, berdiri sejak tahun 2009. Hadirnya Uber menawarkan inovasi baru yakni menghubungkan penumpang dan pengemudi taksi melalui aplikasi. Hal tersebut bertujuan mempermudah penumpang dalam mengakses jasa layanan taksi dan memberikan banyak pilihan lainnya bagi para penumpang.

e. Blue-Jek

Blue-Jek merupakan satu dari sekian aplikasi layanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. *Michael Manuhutu* dan *Garret Kartono* selaku CEO resmi meluncurkan Blue-Jek di Jakarta, pada 17 september 2015. Nama Blue-Jek sendiri berasal dari kata ‘blusukan’ dan “ojek”. *Garet Kartono* mengungkapkan, saat ini Blue-Jek sudah memiliki 1.000 pengendara. Blue-Jek menyodorkan 4 layanan yang bisa di akses melalui call center, juga melalui aplikasi *smartphone* Baik di android maupun iOS. Layanan tersebut yaitu Blu-Rider, Blu-Pick, Blu-Shop dan Blu-Menu.

Adapun kelebihan dan kekurangan dari transportasi sewa khusus yaitu:

1. Kelebihan transportasi sewa khusus

a. Hemat Tenaga dan Waktu

Naik angkot memang tarifnya lebih murah akan tetapi menunggu dan belum tentu supir angkot

mengemudi mobilnya dengan cepat sedangkan kita membutuhkan waktu cepat. Tetapi dengan menggunakan angkutan online misal ojek atau taksi online kita bisa memesan melalui aplikasi dan biayanya juga murah.

b. Bisa Bayar Non Tunai

Salah satu keunggulan transportasi sewa khusus ini adalah memiliki sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu kredit maupun e-cash seperti yang dimiliki GO-JEK maupun UBER.

c. Poin Yang Dapat Ditukarkan

Setiap menggunakan transportasi sewa khusus pengguna akan mendapatkan poin. Poin tersebut dapat di tukarkan dengan makanan, minuman atau belanja.

2. Kekurangan Transportasi Khusus

Dalam syarat dan ketentuan pengguna transportasi (GO-JEK dan UBER) tidak ada asuransi untuk penumpang.

### **3.5 Risiko Kecelakaan Konsumen Pada Saat Menggunakan Jasa Transportasi Sewa Khusus**

Kecelakaan pada konsumen yang telah memakai jasa transportasi sewa khusus, mengakibatkan adanya tanggung jawab dari pelaku usaha (penanggung) dan konsumen sebagai (tertanggung).

### (1) Penanggung

Pengertian penanggung secara umum ialah pihak yang menerima pengalihan risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah di setujui, jika terjadi suatu peristiwa yang tak terduga, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.

Sebagai pihak dalam suatu perjanjian maka kedudukan tertanggung dan penanggung dalam perjanjian asuransi harus memiliki posisi yang setara. Dalam UUPK juga diatur hak dan kewajiban dari pelaku usaha, dalam hal ini adalah penanggung dalam asuransi, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 6, yaitu hak pelaku usaha adalah:

1. “hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Selanjutnya kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7

UUPK ialah :

1. “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan



3. memperlakukan / melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Selanjutnya yang harus diketahui oleh tertanggung adalah prinsip-prinsip asuransi. Prinsip-prinsip asuransi ini menyangkut tentang pembayaran ganti rugi atau uang pertanggungan. Adapun prinsip-prinsip asuransi tersebut ialah sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. *Insurable interest* (kepentingan yang dipertanggungkan) atau *Azas Interest* / Azas Kepentingan

“Orang dikatakan memiliki *insurable interest* atas obyek yang diasuransikan apabila orang tersebut menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah atas obyek tersebut. Apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti bahwa orang tersebut tidak memiliki kepentingan keuangan atas obyek tersebut, maka orang tersebut tidak berhak menerima ganti rugi. Hanya pelanggan yang mempunyai suatu kepentingan yang dapat

---

<sup>67</sup>Pengertian, pelaku, dan prinsip asuransi

<http://www.askrida.com/pengertian-pelaku-dan-prinsip-asuransi.html#.W3oo5dxS3IU> di akses pada tanggal 10 juli 2018

diasuransi-kan dan hanya orang yang punya kepentingan atas objek, yang dapat menerima uang pertanggungan. Hal ini timbul dari hubungan finansial yang diakui hukum dan hubungan tersebut dapat timbul karena undang-undang.” Misalnya menurut undang-undang LLAJ setiap perusahaan angkutan penumpang diharuskan bertanggung jawab apabila ada penumpang yang mengalami kecelakaan. Oleh karena itu perusahaan angkutan tersebut boleh dan bahkan diwajibkan, membeli asuransi kecelakaan untuk penumpangnya.

## 2. Azas Indemnitas / Azas Ganti Rugi

Jika terjadi *evenement* dan menimbulkan kerugian maka penanggung akan memberi ganti rugi kepada tertanggung berdasarkan Azas Keseimbangan. Kerugian yang diganti adalah seimbang dengan kerugian yang benar-benar terjadi atau benar-benar dialami. Tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar dari pada kerugian yang diderita. Jadi Kerugian yang akan diganti rugi adalah kerugian yang benar-benar terjadi atau benar-benar dialami.

Dalam hal ini pelaku usaha sebagai (penanggung) seharusnya memberikan ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

kepada pengguna transportasi sewa khusus (tertanggung) yang mengalami kecelakaan dan mengakibatkan cedera saat menumpangi transportasi sewa khusus.

## (2) Tertanggung

Apabila pengertian konsumen ini dihubungkan dengan pihak dalam perjanjian asuransi maka nampak bahwa yang merupakan konsumen adalah tertanggung dan pelaku usaha adalah penanggung. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menempatkan tertanggung dalam posisi tawar yang cukup kuat dan dalam Pasal 4 undang-undang ini memberikan hak-hak tertanggung sebagai berikut:

1. “Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan, advokasi, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
3. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
4. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
5. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tsb sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
6. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
7. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.”

Sedangkan kewajiban tertanggung menurut Pasal 5 UUPK

ini adalah :

1. “Membaca / mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.



## **B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi Sewa Khusus Atas Adanya Risiko Kecelakaan Pada Penumpang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

### **I. Pelaku Usaha Transportasi Sewa Khusus**

Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Transportasi sewa khusus yang berbasis aplikasi ini misalnya, GO-JEK DAN UBER ini menurut *Co Founder* GO-JEK Kevin Aluwi menyebutkan, “terobosan aplikasi ojek online merupakan kemajuan dalam bidang Usaha Mandiri Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Aplikasi Go-Jek bertujuan memajukan UMKM yang produktifnya masih rendah melalui bantuan teknologi aplikasi”.<sup>68</sup> Adapun perjanjian antara driver dengan penyedia aplikasi (GO-JEK dan UBER) hanya perjanjian kemitraan. Perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdata berbunyi: “Suatu perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

---

<sup>68</sup> Gojek: Aplikasi Ojek Online Merupakan kemajuan UMKM Indonesia <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/16/03/22/o4epjf383-gojek-aplikasi-ojek-online-merupac-kan-kemajuan-umkm-indonesia> di akses pada tanggal 10 april 2018

lebih.” Dan perjanjian kemitraan merupakan perjanjian dan di sepakati antara kedua belah pihak dan di atur dalam pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi: “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan bahwa adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa.

Ketentuan umum perjanjian kemitraan (*partnership agreement*) telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau selanjutnya di sebut KUHPerdata pasal 1338 jo pasal 1320, sedangkan ketentuan khusus 1618 s.d pasal 1641 KUHPerdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu “modal” sebagai “seseheraan” (*inbreng*).

Dalam hal ini ada beberapa pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan perjanjian kemitran yang di buat oleh PT GO-JEK<sup>69</sup>:

a. PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau disingkat menjadi AKAB merupakan pemilik aplikasi GO-JEK, yang dimanfaatkan konsumen (penumpang) yang sudah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar – jemput

---

<sup>69</sup> Andri Ingil Makrifah, **Kepastian Hukum Terhadap Fitur “Shopping” Dalam Aplikasi Layanan GO-JEK**, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017, hal 25-29

barang dan/atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya yang terkait.

b. GO-JEK

GO-JEK merupakan sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai pengelola penyedia jasa pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. GO-JEK disini sama dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, salah satunya adalah jasa untuk antar jemput barang dan/atau orang dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat.

c. PT. Dompot Anak Bangsa

PT. Dompot Anak Bangsa yang disingkat menjadi DAB merupakan sebuah perusahaan yang berafiliasi dan bekerja sama dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dalam melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan sistem uang elektronik, Karna GO-JEK juga menerima pembayaran non tunai.

d. PT. Paket Anak Bangsa

PT. Paket Anak Bangsa atau disingkat menjadi PAB adalah sebuah perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pos.



e. Mitra

Mitra dikenal juga dengan istilah *driver* GOJEK dimana seorang mitra merupakan pihak yang melaksanakan antar – jemput barang dan/atau orang, pesan – antar barang yang sebelumnya telah dipesan oleh konsumen, atau jasa lainnya melalui aplikasi GO-JEK dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh mitra sendiri. *Driver* berperan sebagai kontraktor pihak ketiga *independent* dan tidak dipekerjakan oleh GO-JEK maupun AKAB.

f. Konsumen

Konsumen yang di maksud dalam isi perjanjian kemitraan ini merupakan setiap orang ataupun penumpang yang memanfaatkan aplikasi GO-JEK untuk memperoleh jasa layanan yang tersedia dalam fitur – fitur aplikasi GOJEK.

Para pihak yang di sebutkan di atas di anggap sebagai individu maupun subjek yang secara hukum di anggap telah cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum seperti mengadakan perjanjian. Hubungan hukum antara GO-JEK, AKAB, PAB, DAB, dan Mitra (*driver*). Merupakan hubungan hukum yang berdiri sendiri dan independen.

Dalam proses penyelenggaraan aplikasi GO-JEK perlu diketahui hubungan hukum antara PT. GO-JEK Indonesia sebagai perusahaan penyedia aplikasi dengan *driver* merupakan

hubungan kemitraan yang berdasarkan perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan PT. GO-JEK Indonesia dengan *driver* tidak memenuhi sifat-sifat dan unsur-unsur dari perjanjian kerja seperti, adanya upah, perintah, dan unsur pekerjaan. Berdasarkan lampiran isi perjanjian kemitraan juga telah disebutkan *driver* GO-JEK berperan sebagai mitra. Tidak hanya itu, para *driver* juga tidak mendapatkan gaji dari perusahaan aplikasi GO-JEK melainkan para pengojek harus membagi pendapatannya ke perusahaan. Pendapatan *driver* GO-JEK sendiri bergantung kepada seberapa banyak penumpang yang melakukan pemesanan melalui aplikasi dan kesediaan *driver* untuk menyalurkan jasa sesuai permintaan penumpang

### **1.1 Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Sewa Khusus Sebagai Pelaku usaha**

Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya, baik dalam investasi, distribusi, produksi, dan segala kegiatan yang berkaitan dengan itu senantiasa akan terkait dengan pihak lain yang sering dikenal pihak pengguna atau konsumen. Yang menjadi masalah apabila kegiatan usaha yang dilakukan berakibat menimbulkan kerugian pada pihak konsumen yang dapat berakibat langsung atau tidak langsung. Kerugian yang timbul seperti kecelakaan yang bertanggung jawab seharusnya perusahaan transportasi sewa khusus tersebut.

Pada awalnya pemikiran mengenai prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan merupakan dasar dari prinsip pertanggung jawaban dalam hukum perdata, dimana adanya perjanjian sebagai dasar adanya hubungan hukum antara pengangkut dengan penumpang yang secara kumulatif diperlukan sebagai syarat timbulnya pertanggung jawaban hukum.<sup>70</sup> Perjanjian transportasi sewa khusus seperti perjanjian GRAB, GO-JEK, UBER, dan lain sebagainya merupakan perjanjian jenis baru yang modern, karena perjanjian ini tidak di atur dalam KUHPerdata dan di buat oleh dunia modern melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun syarat-syarat perjanjian yaitu Syarat subjektif suatu perjanjian di antaranya berisi identitas subjek hukum perjanjian. Jika mengacu pada proses pengikatan perjanjian yang berlaku di UBER dan GO-JEK, calon konsumen diwajibkan untuk mengisi identitas berupa nama, alamat, nomor telepon, alamat email, pekerjaan dan lain sebagainya. Setelah semua identitas terisi calon konsumen menekan tombol “daftar”. Ketika tahapan ini terpenuhi, syarat subjektif berupa rincian identitas subjek hukum sudah melekat pada transaksi elektronik yang sedang di lakukan. Rincian identitas sebagai syarat subjektif harus di buat dengan sebenar-benarnya.

---

<sup>70</sup> Inosentius Samsul, **Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak**, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 48.

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun

2008 menyatakan bahwa:

“ Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang di atur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat di pertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

**Tabel 3**  
**Perbedaan Tanggung Jawab Dan Penggantian Kerugian**  
**antara GO-JEK dengan UBER**

<b>Perusahaan</b>	<b>GO-JEK</b>	<b>UBER</b>
<b>Tanggung Jawab</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap cedera, kematian, kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh perilaku dari para Penyedia Layanan.</li> <li>2. Tetapi, kami peduli akan keselamatan pengguna Aplikasi dan, atas pertimbangan pribadi semata dan sepenuhnya, kami bersedia untuk memberikan bantuan keuangan jika pengguna mengalami kecelakaan, menderita cedera atau meninggal saat dijemput oleh Penyedia Layanan.</li> </ol>	Uber tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, insidental, khusus, tambahan, konsekuensial, termasuk kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti yang terkait dengan, sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan layanan, meski uber telah diberi tahu akan kemungkinan kerugian tersebut
<b>Penggantian Kerugian</b>	Dengan menggunakan Aplikasi ini, pengguna setuju bahwa anda akan membela, memberikan ganti rugi dan membebaskan kami, pemberi lisensi, afiliasi, dan masing-masing dari petugas, direktur, komisaris, karyawan, pengacara dan agen kami dari dan terhadap setiap dan semua klaim, biaya, kerusakan, kerugian, kewajiban	Pengguna Uber setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan Uber dan para pejabat, direktur, karyawan dan agen dari setiap dan semua klaim, permintaan, kerugian, kewajiban,

**Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Diolah 2018**

Pertanggung jawaban dalam Pasal 19 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999, dimana pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk ganti rugi dijelaskan melalui Pasal 19 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 yakni dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Akan tetapi dalam tanggung jawab GO-JEK maupun UBER tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang baik itu keselamatan pengguna yang cedera akibat kecelakaan.

Secara teoritis pertanggung jawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggung jawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum yang ada, maka dapat dibedakan:

1. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan adalah tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum atau karena tindakan yang kurang hati-hati;

2. Pertanggungjawaban atas dasar risiko adalah tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus di ambil oleh seorang pelaku usaha atas kegiatan usahanya.<sup>71</sup>

Mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang di atur dalam pasal 19 UUPK:

1. “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang di hasilkan atau yang di perdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undang yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Adapun sanksi bagi pelaku usaha menurut undang-ndang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

(1) Sanksi Perdata ganti rugi dalam bentuk:

1. Pengembalian uang
2. Penggantian barang
3. Perawatan kesehatan
4. Pemberian santunan

(2) Sanksi Administrasi yaitu maksimal ganti rugi dalam tempo 7 hari setelah transaksi maksimal Rp.200.000.000 (dua ratus juta

---

<sup>71</sup> Janus Sidabalok, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2014, hal 90-91



rupiah), melalui BPSK (badan penyelesaian sengketa konsumen) jika melanggar pasal 19 ayat (2) dan (3) pasal 20 dan pasal 25.

### 1.2 Driver Sebagai Pelaku Usaha Penghubung

Dengan status pelaku usaha penghubung, driver ojek online tidak memiliki hubungan kerja dengan PT. UBER dan PT.GO-JEK Indonesia. Karena antara driver dengan PT. UBER merupakan perjanjian kemitraan secara tertulis di saat Mitra/*driver* dengan pihak PT UBER, yang kedua yaitu secara elektronik saat *driver* pertama kali mengunduh aplikasi GO-JEK melalui *smartphone android* dan *log in* untuk pertama kali. Kemudian pada pasal 1 dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara *driver* dengan PT. GO-JEK Indonesia di sebutkan tentang tanggung jawab melaksanakan order yang telah di berikan oleh PT. GO-JEK melalui aplikasi yang sudah di unduh oleh penumpang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan di atas bentuk perlindungan hukum bagi penumpang transportasi sewa khusus atas adanya risiko kecelakaan di bagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Bentuk perlindungan hukum transportasi sewa khusus yang di atur dalam peraturan menteri perhubungan nomor 108 tentang penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek. Pemerintah merumuskan PM Nomor 108 Tahun 2017 berdasarkan tiga landasan yaitu: (1). kepentingan nasional yang berada di atas segalanya. (2). kepentingan pengguna jasa dalam hal aspek keselamatan dan perlindungan konsumen seperti aturan yang mengatur tentang asuransi. (3). kesetaraan dalam kesempatan berusaha.
- 2) Bentuk perlindungan hukum bagi penumpang transportasi sewa khusus yang di tinjau dari UU.<sup>72</sup> yaitu “pelaku usaha memberi kompensasi, ganti rugi apabila jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian.”

2. Tanggung jawab pelaku usaha transportasi sewa khusus atas adanya risiko kecelakaan pada penumpang menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Adapun tanggung jawab dari pelaku usaha adanya ganti rugi berupa pengembalian uang atau

---

<sup>72</sup>undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang di sebutkan dalam pasal 7 huruf g

perawatan kesehatan akibat dari kecelakaan tersebut. Sanksi Perdata ganti rugi dalam bentuk:(1) Pengembalian uang(2)Penggantian barang,(3)Perawatan kesehatan(4)Pemberian santunan

Adapun Sanksi Administrasi yaitu maksimal ganti rugi dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi maksimal Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melalui BPSK (badan penyelesaian sengketa konsumen) jika melanggar pasal 19 ayat (2) dan (3) pasal 20 dan pasal 25.

## **B. Saran**

Untuk perlindungan terhadap pengguna jasa transportasi sewa khusus Go-Jek dan Uber yang di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Nomor 108 Tahun 2017 selanjutnya di singkat dengan PM 108 tahun 2017.

1. Kepada Pengguna (penumpang) Transportasi Sewa Khusus jika ingin menggunakan transportasi khusus untuk perjalanan, sebaiknya lebih berhati-hati karena pelaku usaha tidak memberikan perlindungan asuransi, dan peraturan menteri juga tidak mengatur asuransi dalam transportasi sewa khusus, hanya diatur dalam transportasi umum
2. Kepada Pelaku Usaha Transportasi Sewa Khusus, seharusnya bekerjasama dengan asuransi agar melindungi konsumennya (penumpang) yang telah menggunakan jasa transportasi sewa khusus tersebut.

3. Kepada pemerintah, dalam PM 108 tahun 2017 tersebut hanya menerapkan asuransi dalam Angkutan Umum sedangkan Go-Jek dan Uber atau sering di sebut transportasi *online* termasuk Angkutan Sewa Khusus. Seharusnya dalam PM 108 tahun 2017 menerapkan asuransi bagi pengguna transportasi sewa khusus. Agar pengguna transportasi sewa khusus aman jika menggunakan transportasi sewa khusus.



**Berkata Dari Buku:**

Abdulkadir muhamad, **Hukum Pengangkutan Niaga**, Citra Bakti, Bandung 1998

\_\_\_\_\_, **Hukum Perusahaan Indonesia**, cet 4, PT citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,

Abbas salim, **Asuransi dan Menejemen Risiko**, Edisi 2, Jakarta, PT Raja

Grafindo Persada, 2007

Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005

Andri Ingil Makrifah, **Kepastian Hukum Terhadap Fitur “Shopping” Dalam Aplikasi Layanan GO-JEK**, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017

Celina Tri siwi Kristiyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika, 2008

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1996

Erman Rajagukguk, **Butir-Butir Hukum Ekonomi**, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011

Hardijan Rusli, **Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997

M. Arsyad Sanusi, **E commerce Hukum dan solusinya**, Cet 1, PT Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2001

Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003

Munir Fuady, **Konsep Hukum Perdata**, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Shidarta, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia**, PT Grasindo, jakarta, 2000

Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia**, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987

R. Subekti. **Hukum Perjanjian**. Intermasa, Jakarta 1996

Ratnasari, Ririn Tri & Mastuti H. Aksa. (2011). **Manajemen Pemasaran Jasa**. Bogor: Ghalia Indonesia.

Raharjo Adisasmita, **Analisis Kebutuhan Transportasi**, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015

Sadjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Satjipto Raharjo , **Sisi lain dari Hukum di Indonesia**, Jakarta, Kompas, 2003

Setiawan Widagdo, **Kamus Hukum**, jakarta: PT Prestasi Pustaka, 2012

Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, cet ke VI, Putra A Bardin, Bandung 1999

Siswanto Sunarso, **Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik**, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

- Sudikno Mertokusomo, **Mengenal Hukum (suatu pengantar)**, Liberty yogyakarta, 2007
- Soerjono dan Abdurrahman **Metode Penelitian Hukum**, Rinek Cipta, Jakarta, 2003
- Soerjono soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, jakarta; PT Raja Grafindo Persada 2013
- Tuti Rastuti, **Aspek Hukum Perjanjian Asuransi**, Pustaka Yustisia, yogyakarta, 2011
- Wahyu sasongko, **Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum perlindungan Konsumen**, Lampung, universitas bandar lampung, 2007

#### **Dari Undang-Undang:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 tahun 2017
- Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian

#### **Dari Jurnal:**

- Tri Puji Astuti, Rinitami Njatrijani, Herni Widanarti, **Asuransi kecelakaan Diri (Personal Accident) Pada PT. Allianz Utama Indonesia Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Go-Jek di wilayah Jakarta**, jurnal, ilmu hukum, universitas diponegoro
- Endang Wahyusetyawati, **Dilema Pengaturan Transportasi Online**, Jurnal, Rechvinding online,
- Rio Bagus Firmansyah Al Rasyid, **Kualitas Pelayanan Transportasi Publik (Studi Deskriptif tentang Kualitas Pelayanan Jasa Angkutan Umum Perum Damri Unit Angkutan Bus Khusus Gresik-Bandara Juanda)** Jurnal, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UNAIR

#### **Dari internet:**

**[https://id.wikibooks.org/wiki/Moda Transportasi/Sejarah transportasi](https://id.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Sejarah_transportasi)** di akses pada tanggal 5 maret 2018

**Moda sejarah atau Sejarah Transportasi**  
**[https://id.wikibooks.org/wiki/Moda Transportasi/Sejarah transportasi](https://id.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Sejarah_transportasi)** di akses pada tanggal 5 maret 2018

**Persyaratan dan Ketentuan Uber** **<https://www.uber.com/id/legal/terms/id/>** di akses pada tanggal 5 maret 2018

**Pemerintah Kesulitan Mencari Payung Hukum Untuk Roda Dua**



<http://mediaindonesia.com/read/detail/104428-pemerintah-kesulitan-cari-payung-hukum-angkutan-roda-dua> di akses pada tanggal 20 juli 2017

<http://kbbi.co.id/arti-kata/transportasi/diakses> pada tanggal 10 maret 2018

**Hubungan Antara Penyedia Aplikasi, Driver dan Penumpang**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56a9c0362ef3d/hubungan-antara-penyedia-aplikasi--idriver-i--dan-penumpang> di akses pada tanggal 22 april 2018

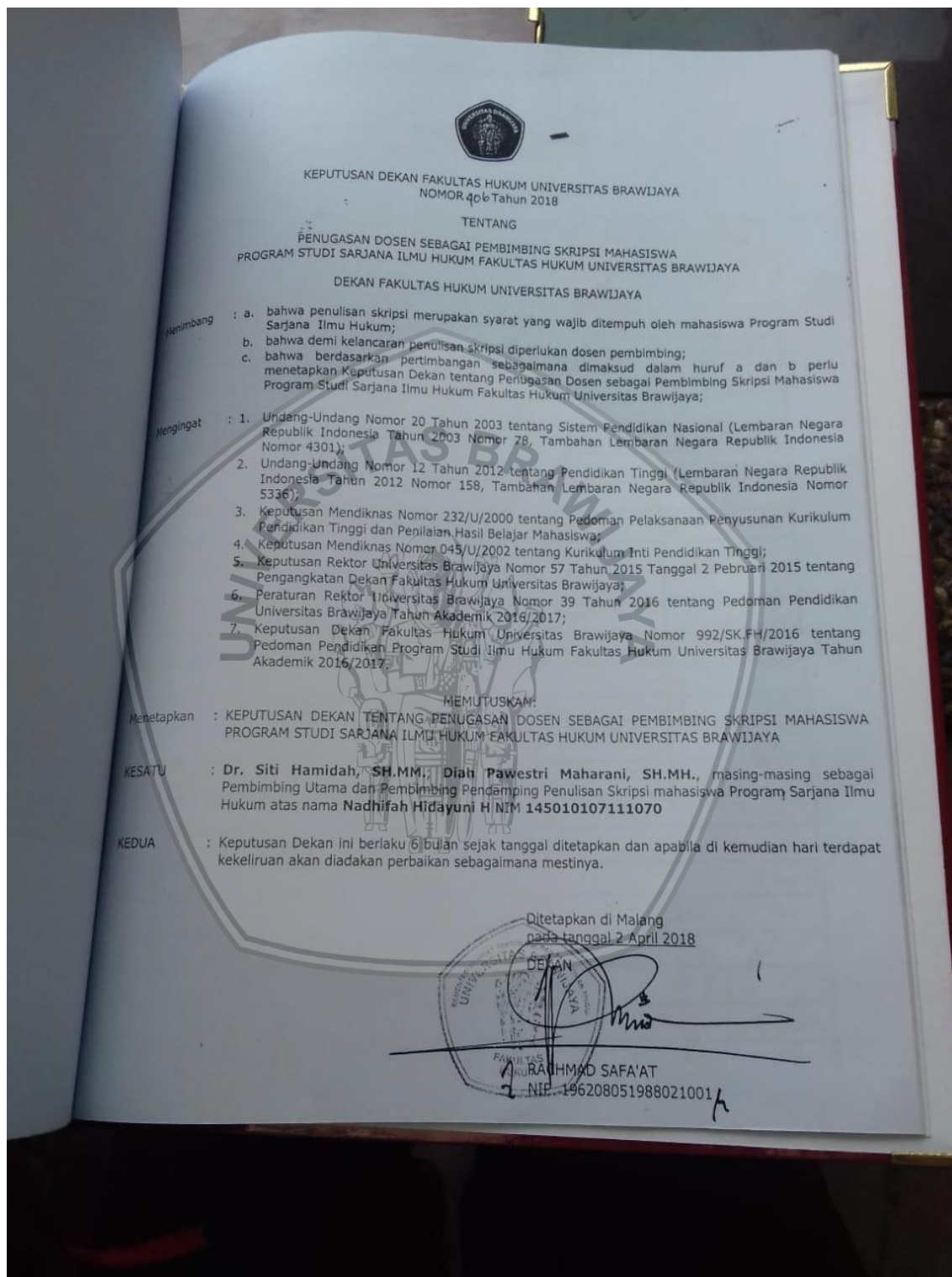
**Hak dan Kewajiban Driver GO-FLEET** <https://driver.go-car.co.id/hc/id/articles/360001693827-Hak-dan-Kewajiban-Driver-GO-FLEET> di akses pada tanggal 13 juli 2018

**Pengertian, pelaku, dan prinsip asuransi** <http://www.askrida.com/pengertian-pelaku-dan-prinsip-asuransi.html#.W3oo5dxS3IU> di akses pada tanggal 10 juli 2018



Lampiran I

SK BIMBINGAN DAN KARTU BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI  
BAGIAN PERDATA

Bimbingan Utama : Dr. Siti Hamidah, SH, M.M. Nama Mahasiswa : Nahdhan Hidayati Hamzah  
Bimbingan Pendamping : Dr. Puwetri Mahasani, SH, M.H. NIM : 14501010711010  
No. : 44.5 Judul Skripsi : Perkembangan Hukum Bagi Penumpang Transportasi Laut Dalam Era Digital  
Tgl. : 2 April 2018 Etnis : Orang Jawa

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Ttd. Dosen
1	17/3/2018	Revisi mengenai judul skripsi dan isu hukum	Judul dan mencari kasus	<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
2	14/4/2018	Revisi Latar belakang	Pelembangan Teknologi Masalah Perikanan	<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
3	16/4/2018	Revisi Abstrak dan Outline		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
4	16/4/2018	Revisi Pembahasan		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
5	16/4/2018	Revisi Kesimpulan		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
6	16/4/2018	Revisi Daftar Pustaka		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
7	16/4/2018	Revisi Bab IV		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
8	16/4/2018	Revisi Bab V		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
9	16/4/2018	Revisi Bab VI		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
10	16/4/2018	Revisi Bab VII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
11	16/4/2018	Revisi Bab VIII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
12	16/4/2018	Revisi Bab IX		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
13	16/4/2018	Revisi Bab X		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
14	16/4/2018	Revisi Bab XI		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
15	16/4/2018	Revisi Bab XII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
16	16/4/2018	Revisi Bab XIII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
17	16/4/2018	Revisi Bab XIV		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
18	16/4/2018	Revisi Bab XV		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
19	16/4/2018	Revisi Bab XVI		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
20	16/4/2018	Revisi Bab XVII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
21	16/4/2018	Revisi Bab XVIII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
22	16/4/2018	Revisi Bab XIX		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
23	16/4/2018	Revisi Bab XX		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
24	16/4/2018	Revisi Bab XXI		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
25	16/4/2018	Revisi Bab XXII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
26	16/4/2018	Revisi Bab XXIII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
27	16/4/2018	Revisi Bab XXIV		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
28	16/4/2018	Revisi Bab XXV		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
29	16/4/2018	Revisi Bab XXVI		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
30	16/4/2018	Revisi Bab XXVII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
31	16/4/2018	Revisi Bab XXVIII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
32	16/4/2018	Revisi Bab XXIX		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
33	16/4/2018	Revisi Bab XXX		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
34	16/4/2018	Revisi Bab XXXI		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
35	16/4/2018	Revisi Bab XXXII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
36	16/4/2018	Revisi Bab XXXIII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
37	16/4/2018	Revisi Bab XXXIV		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
38	16/4/2018	Revisi Bab XXXV		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
39	16/4/2018	Revisi Bab XXXVI		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
40	16/4/2018	Revisi Bab XXXVII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
41	16/4/2018	Revisi Bab XXXVIII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
42	16/4/2018	Revisi Bab XXXIX		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
43	16/4/2018	Revisi Bab XL		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
44	16/4/2018	Revisi Bab XLI		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
45	16/4/2018	Revisi Bab XLII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
46	16/4/2018	Revisi Bab XLIII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
47	16/4/2018	Revisi Bab XLIV		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
48	16/4/2018	Revisi Bab XLV		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
49	16/4/2018	Revisi Bab XLVI		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
50	16/4/2018	Revisi Bab XLVII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
51	16/4/2018	Revisi Bab XLVIII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
52	16/4/2018	Revisi Bab XLIX		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
53	16/4/2018	Revisi Bab L		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
54	16/4/2018	Revisi Bab LI		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
55	16/4/2018	Revisi Bab LII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
56	16/4/2018	Revisi Bab LIII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
57	16/4/2018	Revisi Bab LIV		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
58	16/4/2018	Revisi Bab LV		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
59	16/4/2018	Revisi Bab LVI		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
60	16/4/2018	Revisi Bab LVII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
61	16/4/2018	Revisi Bab LVIII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
62	16/4/2018	Revisi Bab LIX		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
63	16/4/2018	Revisi Bab LX		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
64	16/4/2018	Revisi Bab LXI		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
65	16/4/2018	Revisi Bab LXII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
66	16/4/2018	Revisi Bab LXIII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
67	16/4/2018	Revisi Bab LXIV		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
68	16/4/2018	Revisi Bab LXV		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
69	16/4/2018	Revisi Bab LXVI		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
70	16/4/2018	Revisi Bab LXVII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
71	16/4/2018	Revisi Bab LXVIII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
72	16/4/2018	Revisi Bab LXIX		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
73	16/4/2018	Revisi Bab LXX		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
74	16/4/2018	Revisi Bab LXXI		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
75	16/4/2018	Revisi Bab LXXII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
76	16/4/2018	Revisi Bab LXXIII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
77	16/4/2018	Revisi Bab LXXIV		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
78	16/4/2018	Revisi Bab LXXV		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
79	16/4/2018	Revisi Bab LXXVI		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
80	16/4/2018	Revisi Bab LXXVII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
81	16/4/2018	Revisi Bab LXXVIII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
82	16/4/2018	Revisi Bab LXXIX		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
83	16/4/2018	Revisi Bab LXXX		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
84	16/4/2018	Revisi Bab LXXXI		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
85	16/4/2018	Revisi Bab LXXXII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
86	16/4/2018	Revisi Bab LXXXIII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
87	16/4/2018	Revisi Bab LXXXIV		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
88	16/4/2018	Revisi Bab LXXXV		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
89	16/4/2018	Revisi Bab LXXXVI		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
90	16/4/2018	Revisi Bab LXXXVII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
91	16/4/2018	Revisi Bab LXXXVIII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
92	16/4/2018	Revisi Bab LXXXIX		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
93	16/4/2018	Revisi Bab LXXXX		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
94	16/4/2018	Revisi Bab LXXXXI		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
95	16/4/2018	Revisi Bab LXXXXII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
96	16/4/2018	Revisi Bab LXXXXIII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
97	16/4/2018	Revisi Bab LXXXXIV		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
98	16/4/2018	Revisi Bab LXXXXV		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
99	16/4/2018	Revisi Bab LXXXXVI		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.
100	16/4/2018	Revisi Bab LXXXXVII		<u>Del</u> Diah Puwetri M. SH, M.H.

*Lampiran II***PERATURAN APLIKASI GOJEK****Ketentuan Penggunaan**

Dengan mengunduh, memasang, dan/atau menggunakan Aplikasi GO-JEK ("**Aplikasi**"), Anda setuju bahwa Anda telah membaca, memahami dan menerima dan menyetujui Ketentuan Penggunaan ini ("**Ketentuan Penggunaan**"). Ketentuan Penggunaan ini merupakan suatu perjanjian sah antara Anda dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Layanan dan Aplikasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berlaku pada kunjungan dan penggunaan Anda pada situs web kami di [www.GO-JEK.com](http://www.GO-JEK.com) ("**Situs web**").

Silahkan membatalkan akun Anda (jika Anda telah mendaftar untuk Aplikasi) dan secara permanen menghapus aplikasi dari perangkat Anda jika Anda tidak setuju atau tidak ingin masuk ke dalam Ketentuan Penggunaan.

MOHON ANDA MEMERIKSA KETENTUAN PENGGUNAAN DAN KEBIJAKAN PRIVASI KAMI DENGAN SEKSAMA SEBELUM MENGUNDUH APLIKASI ATAU MENGGUNAKAN LAYANAN KAMI UNTUK PERTAMA KALI.

**1. Hal-hal Umum**

- 1) PT Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia ("**kami**" atau "**milik kami**").
- 2) Aplikasi ini merupakan aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk menemukan layanan dengan menggunakan sepeda motor yang disediakan oleh pihak ketiga (pengemudi ojek) ("**Penyedia(-penyedia) Layanan**"). Aplikasi ini menawarkan informasi tentang layanan yang ditawarkan oleh Penyedia Layanan. Jenis layanan yang dapat diminta melalui Aplikasi adalah:
  - a. Kurir Instan;
  - b. Transportasi;
  - c. Pengiriman Makanan;
  - d. Pembelanjaan Pribadi; dan

- e. Layanan lain yang dapat kami tambahkan dari waktu ke waktu ("Layanan").
- 3) Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengirimkan permintaan untuk suatu Layanan kepada Penyedia Layanan. Penerima GPS - yang harus dipasang pada perangkat bergerak (smart phone) dimana Anda telah mengunduh Aplikasi - mendeteksi lokasi Anda dan mengirimkan informasi lokasi Anda ke Penyedia Layanan terkait. Penyedia Layanan memiliki kebijakan sendiri dan menyeluruh untuk menerima atau menolak setiap permintaan Anda atas Layanan. Penyedia Layanan juga memiliki kebijakannya sendiri dan menyeluruh untuk memilih dan menerima arahan-arahan yang diberikan oleh Aplikasi tersebut. Jika Penyedia Layanan menerima permintaan Anda, Aplikasi akan memberitahu Anda dan memberikan informasi mengenai Penyedia Layanan - termasuk nama Penyedia Layanan, nomor polisi kendaraannya, dan penilaian pelayanan pelanggan - dan kemampuan untuk menghubungi Penyedia Layanan melalui telepon. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda untuk melihat perkembangan Penyedia Layanan menuju titik penjemputan, secara langsung/real time.
- 4) Kami akan melakukan semua upaya wajar untuk menghubungkan Anda dengan Penyedia Layanan untuk mendapatkan Layanan, tergantung kepada keberadaan Penyedia Layanan di atau di sekitar lokasi Anda pada saat Anda melakukan pemesanan Layanan.
- 5) UNTUK MENGHINDARI KERAGU-RAGUAN, KAMI ADALAH PERUSAHAAN TEKNOLOGI, BUKAN PERUSAHAAN TRANSPORTASI ATAU KURIR DAN KAMI TIDAK MEMBERIKAN LAYANAN TRANSPORTASI ATAU KURIR. Kami tidak mempekerjakan Penyedia Layanan dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap tindakan dan/atau kelalaian Penyedia Layanan. Aplikasi ini hanya merupakan sarana untuk memudahkan pencarian atas Layanan. Adalah tergantung pada Penyedia Layanan untuk menawarkan Layanan kepada Anda dan



tergantung pada Anda apakah Anda akan menerima tawaran Layanan dari Penyedia Layanan.

## **2. Ketentuan untuk Menggunakan Aplikasi**

- 1) Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda adalah individu yang secara hukum berhak untuk mengadakan perjanjian yang mengikat berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, khususnya Ketentuan Penggunaan, untuk menggunakan Aplikasi dan bahwa Anda telah berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian. Jika tidak, kami atau Penyedia Layanan terkait, berhak berdasarkan hukum untuk membatalkan perjanjian yang dibuat dengan Anda. Anda selanjutnya menyatakan dan menjamin bahwa Anda memiliki hak, wewenang dan kapasitas untuk menggunakan Layanan Anda juga menyatakan dan menjamin bahwa Anda berwenang untuk mengadakan, dan mengikatkan diri entitas tersebut pada Ketentuan Penggunaan ini dan mendaftarkan untuk Layanan dan Aplikasi.
- 2) Kami mengumpulkan dan memproses informasi pribadi Anda, seperti nama, alamat surat elektronik (surel / e-mail), dan nomor telepon seluler Anda ketika Anda mendaftar. Anda harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap, memperbaharui informasi dan setuju untuk memberikan kepada kami bukti identitas apapun yang secara wajar dapat kami mintakan. Jika informasi pribadi yang Anda berikan kepada kami ada yang berubah, misalnya, jika Anda mengubah alamat surel, nomor telepon, atau jika Anda ingin membatalkan akun Anda, mohon perbaharui rincian informasi Anda dengan mengirimkan permintaan Anda kepada kami. Kami akan, sepanjang yang dapat kami lakukan, memberlakukan perubahan yang diminta tersebut dalam waktu lima belas (15) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan.
- 3) Anda hanya dapat menggunakan Aplikasi ketika Anda telah mendaftar pada Aplikasi tersebut. Setelah Anda berhasil mendaftarkan diri, Aplikasi akan memberikan Anda suatu akun pribadi yang dapat diakses dengan kata sandi yang Anda pilih.



- 4) Hanya Anda yang dapat menggunakan akun Anda sendiri dan Anda berjanji untuk tidak memberikan wewenang kepada orang lain untuk menggunakan identitas Anda atau menggunakan akun Anda. Anda tidak dapat menyerahkan atau mengalihkan akun Anda kepada pihak lain. Anda harus menjaga keamanan dan kerahasiaan kata sandi akun Anda dan setiap identifikasi yang kami berikan kepada Anda. Dalam hal terjadi pengungkapan atas kata sandi Anda, dengan cara apapun, yang mengakibatkan setiap penggunaan yang tidak sah atau tanpa kewenangan atas akun atau identitas Anda, pesanan yang diterima dari penggunaan yang tidak sah atau tanpa kewenangan tersebut masih akan dianggap sebagai pesanan yang sah, kecuali Anda memberitahu kami tentang mengenai hal tersebut sebelum Penyedia Layanan memberikan Layanan yang diminta.
- 5) Anda hanya dapat memiliki satu akun GO-JEK.
- 6) Informasi yang diberikan oleh Aplikasi tidak dapat diartikan sebagai suatu saran atau penawaran, keputusan untuk menggunakan Penyedia Layanan sepenuhnya berada di tangan Anda. Anda bebas untuk memilih untuk menggunakan penyedia layanan lainnya.
- 7) Anda berjanji bahwa Anda akan menggunakan Aplikasi hanya untuk tujuan yang dimaksud untuk mendapatkan Layanan. Anda tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan atau menggunakan Aplikasi untuk tujuan penipuan atau menyebabkan ketidaknyamanan kepada orang lain atau melakukan pemesanan palsu.
- 8) Jika Anda juga adalah seorang Penyedia Layanan, Anda tidak dapat menggunakan akun konsumen Anda sendiri (atau akun milik konsumen orang lain) untuk melakukan pemesanan yang akan Anda terima sendiri sebagai seorang pengemudi.
- 9) Anda tidak diperkenankan untuk membahayakan, mengubah atau memodifikasi Aplikasi dan/atau Situs web atau mencoba untuk membahayakan, mengubah atau memodifikasi Aplikasi dan/atau Situs web dengan cara apapun. Kami tidak bertanggungjawab jika Anda tidak memiliki perangkat yang sesuai atau jika Anda telah mengunduh versi Aplikasi yang salah untuk perangkat Anda. Kami berhak untuk

melarang Anda untuk menggunakan Aplikasi lebih lanjut jika Anda menggunakan Aplikasi dengan perangkat yang tidak kompatibel/cocok atau tidak sah atau untuk tujuan lain selain daripada tujuan yang dimaksud untuk penggunaan Aplikasi ini. Anda berjanji bahwa Anda hanya akan menggunakan suatu jalur akses yang diperbolehkan untuk Anda gunakan.

- 10)** Anda akan menjaga kerahasiaan dan tidak akan menyalahgunakan informasi yang Anda terima dari penggunaan Aplikasi tersebut. Anda akan memperlakukan Penyedia Layanan dengan hormat dan tidak akan terlibat dalam perilaku atau tindakan yang tidak sah, mengancam atau melecehkan ketika menggunakan layanan mereka.
- 11)** Anda memahami dan setuju bahwa penggunaan Aplikasi oleh Anda akan tunduk pula pada Kebijakan Privasi kami sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan Aplikasi, Anda juga memberikan persetujuan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Kebijakan Privasi kami.
- 12)** Dengan memberikan informasi kepada kami, Anda menyatakan bahwa Anda berhak untuk memberikan kepada kami informasi yang akan kami gunakan dan berikan kepada Penyedia Layanan.
- 13)** Aplikasi tidak boleh dipergunakan untuk mencari Layanan untuk:
  - a.** mengangkut dan/atau memperoleh dan/atau membeli barang yang dilarang oleh pejabat yang berwenang atau barang yang memerlukan lisensi atau izin tertentu dari pejabat yang berwenang untuk dikirimkan;
  - b.** mengangkut barang dari dan ke penjara;
  - c.** membeli dan/atau mengangkut binatang peliharaan atau binatang lain;
  - d.** mengangkut barang-barang dengan dimensi lebih dari 70cm (panjang), 50cm (lebar), 50 cm (tinggi) atau barang-barang yang beratnya lebih dari 20kg;
  - e.** membeli dan/atau mengangkut barang-barang ilegal atau berbahaya atau barang-barang curian, termasuk namun tidak

- terbatas pada barang-barang yang mengandung bahan berbahaya atau beracun, obat-obatan atau material terlarang/illegal; dan
- f. membeli dan/atau mengangkut atau mengirimkan barang-barang berharga atau barang yang bernilai lebih dari Rp10.000.000,-
- 14)** Anda harus memberikan kepada kami informasi yang akurat dan lengkap mengenai jenis, ukuran, spesifikasi dan/atau setiap karakteristik khusus dari makanan atau barang yang akan dikirimkan dengan layanan Kurir Instan atau dibeli dengan layanan Pengiriman Makanan atau layanan Pembelian Pribadi.
- 15)** Anda harus mengemas dengan benar barang-barang yang rapuh, seperti gelas, keramik, kue atau makanan, untuk pengiriman. Kami maupun Penyedia Layanan tidak akan bertanggung jawab atas segala kerusakan, perubahan bentuk, pembungkusan, kadaluwarsa, pembusukan, bau, tumpahan atau ketidaklengkapan lain dari produk selama pengiriman yang disebabkan oleh kemasan atau pembungkusan yang kurang baik/sesuai.
- 16)** Penyedia Layanan dapat meminta Anda untuk membuka dan menunjukkan bagian dalam suatu paket untuk memastikan bahwa isinya adalah seperti yang Anda nyatakan.
- 17)** Penyedia Layanan berhak untuk menolak pesanan Anda jika menurut penilaian pribadi Penyedia Layanan, ia mungkin tidak dapat melakukan pengiriman barang.
- 18)** Anda menyatakan bahwa Anda telah, adalah, atau akan menjadi pemilik yang sah atas barang yang akan dikirimkan. Barang yang dikirim bukan barang curian atau diperoleh secara tidak sah dan Anda setuju untuk menjaga, mengganti kerugian dan membebaskan kami dan kami tidak bertanggung jawab atas barang yang dikirimkan oleh Penyedia Layanan yang mungkin melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 19)** Kami dan/atau Penyedia Layanan yang terkait berhak menolak untuk menerima pesanan Anda jika kami memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai bahwa Anda telah, atau dengan menerima pesanan dari

Anda, Anda akan melanggar Ketentuan Penggunaan ini atau hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 20) Kami dapat, berdasarkan kebijakan kami, memberikan promosi-promosi yang dapat ditukar untuk manfaat terkait dengan penggunaan Aplikasi. Anda setuju bahwa Anda hanya akan menggunakan promosi tersebut sebagaimana promosi tersebut dimaksudkan dan tidak akan menyalahgunakan, menggAndakan, menjual atau mengalihkan promosi tersebut dengan cara apapun. Anda juga memahami bahwa promosi tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai dan dapat berakhir pada tanggal tertentu, bahkan sebelum Anda menggunakannya.
- 21) Untuk ketentuan Layanan Pembelanjaan Pribadi, Anda menyatakan bahwa barang yang akan dibeli dan dikirimkan oleh Penyedia Layanan adalah barang yang sah dan tidak melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan cara apapun. Anda setuju untuk menjaga, mengganti kerugian dan membebaskan kami dan kami tidak bertanggung jawab atas barang yang dibeli oleh Penyedia Layanan atas nama Anda dan diberikan kepada Anda yang mungkin dapat melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 22) Anda mengakui dan setuju untuk memberikan kepada Penyedia Layanan kuasa dan wewenang untuk mengambil barang-barang atau makanan, melakukan suatu pembelian atas nama Anda untuk setiap pemesanan di layanan Kurir Instan, Pengiriman Makanan, atau Pembelanjaan Pribadi.
- 23) Anda hanya dapat melakukan pemesanan atas makanan yang tersedia di menu makanan restoran-restoran yang ada di layanan Pengiriman Makanan.
- 24) Kami tidak menjamin ketersediaan barang pesanan di toko/restoran dan pengiriman barang-barang yang rapuh/mudah rusak seperti kue dan es krim.
- 25) Kami tidak bertanggung jawab atas kualitas makanan dan/atau barang yang disediakan oleh restoran-restoran dan/atau toko dalam layanan Pengiriman Makanan dan Pembelanjaan Pribadi.

- 26) Anda mengakui dan memahami bahwa harga makanan atau barang yang ditampilkan di layanan Pengiriman Makanan atau Pembelian Pribadi adalah merupakan perkiraan dan dapat berubah dari waktu ke waktu.
- 27) Kami atau Penyedia Layanan tidak menjamin ketersediaan makanan atau barang di restoran atau toko.
- 28) Penyedia Layanan hanya akan mengirimkan minuman beralkohol untuk pelanggan yang berusia di atas 21 tahun. Anda setuju untuk menunjukkan kartu identitas (KTP) Anda untuk diperiksa oleh Penyedia Layanan pada saat pengiriman.
- 29) Anda memahami dan mengakui bahwa dengan memilih ya pada halaman pop-up pemeriksaan usia saat memasuki toko minuman beralkohol atau menambahkan minuman beralkohol ke troli, Anda memastikan bahwa Anda telah melebihi batas usia yang sah untuk mengonsumsi minuman beralkohol.
- 30) Semua bir (Bintang dan Heineken) di toko bir Bintang (Bintang Store) akan dikirimkan dari toko terdekat, tidak langsung dari toko bir Bintang.
- 31) Sehubungan dengan Layanan Transportasi, Anda berjanji bahwa Anda akan mengenakan helm yang disediakan oleh Penyedia Layanan Anda selama perjalanan. Anda juga berjanji bahwa untuk setiap Layanan Transportasi, hanya akan ada satu penumpang dari Penyedia Layanan. Penyedia Layanan berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan Layanan Transportasi jika ia mengetahui bahwa jumlah penumpangnya akan lebih dari satu orang.
- 32) Mohon menginformasikan kepada kami jika Anda tidak lagi memiliki kontrol atas akun Anda, sebagai contoh akun Anda dengan cara bagaimanapun diretas (hack) atau telepon Anda dicuri, sehingga kami dapat membatalkan akun Anda dengan sebagaimana mestinya. Mohon diperhatikan bahwa Anda bertanggung jawab atas penggunaan akun Anda dan Anda mungkin dapat dimintakan tanggung jawabnya meskipun jika akun Anda tersebut disalahgunakan oleh orang lain.



### 3. Pembayaran

- 1) Pengunduhan dan/atau penggunaan Aplikasi ini adalah bebas biaya. Kami dapat memperkenalkan pengenaan biaya untuk pengunduhan dan/atau penggunaan Aplikasi di setiap saat. Kami akan memberitahu anda tentang hal ini sebagaimana mestinya agar anda dapat memutuskan apakah anda ingin terus menggunakan Aplikasi tersebut atau tidak. Namun demikian, koneksi internet yang dibutuhkan untuk menggunakan Layanan, dan setiap biaya terkait (misalnya biaya data ponsel) yang ditimbulkan oleh penggunaan Layanan tersebut adalah tanggung jawab eksklusif anda dan semata-mata dibebankan kepada anda.
- 2) Tarif yang berlaku untuk Layanan oleh Penyedia Layanan dapat ditemukan pada Situs dan melalui Aplikasi. Kami dapat mengubah atau memperbaharui tarif dari waktu ke waktu. Kami akan membantu Penyedia Layanan untuk menghitung biaya berdasarkan pesanan anda dan memberitahu anda tentang biaya atas nama Penyedia Layanan.
- 3) Anda setuju bahwa anda akan membayar Layanan yang diberikan kepada anda oleh Penyedia Layanan secara penuh.
- 4) Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan menggunakan GO-JEK Credit anda. Semua pembayaran tunai harus dilakukan dalam Rupiah. GO-JEK Credit dapat diperoleh dengan mentransfer jumlah yang anda inginkan ke rekening BCA kami di nomor 524 032 7068.
- 5) GO-JEK Credit bukan merupakan tabungan dan karena itu tidak termasuk dalam pengaturan oleh Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia (LPS). Karena GO-JEK Credit dapat dikategorikan sebagai e-money berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan GO-JEK Credit harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Jumlah maksimum GO-JEK Credit anda adalah Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan maksimum total nilai transaksi anda dalam sebulan adalah Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah).
- 7) GO-JEK Credit adalah dana Anda yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran:



- a. Layanan Kurir Instan dan Transportasi yang disediakan oleh Penyedia Layanan; dan
  - b. Biaya dari Penyedia Layanan dalam pelayanan Pembelanjaan Pribadi.
- 8) GO-JEK Credit tidak dapat digunakan untuk pembayaran:
- a. Biaya dari Penyedia Layanan dalam layanan Pengiriman Makanan; dan
  - b. Makanan dan / atau barang dalam layanan Pengiriman Makanan dan Pembelanjaan Pribadi.
- 9) GO-JEK dapat, dari waktu ke waktu, menambah jumlah GO-JEK Credit anda di akun anda sebagai bagian dari promosinya (misalnya, kode rujukan / referral code). Namun demikian, ini hanya suatu nilai yang setara dengan nilai uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat diubah menjadi uang elektronik (e-money).
- 10) Ketika anda meminta untuk menggunakan GO-JEK Credit sebagai alat pembayaran atas Layanan, anda dengan ini mengakui dan setuju untuk memberikan kami kuasa dan kewenangan penuh untuk memotong GO-JEK Credit anda dan mentransfer uang atas nama anda untuk membayar Layanan yang disediakan oleh Penyedia Layanan.
- 11) Makanan atau barang yang dipesan dengan layanan Pengiriman Makanan dan Pembelanjaan Pribadi harus dibayar tunai pada saat penyerahan makanan atau barang jika nilai makanan atau barang di bawah Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
- 12) Setiap pemesanan layanan Pengiriman Makanan atau layanan Pembelanjaan Pribadi untuk barang atau makanan dengan total harga lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) harus dibayar tunai dimuka kepada Penyedia Layanan sebelum pelaksanaan Layanan.
- 13) Biaya untuk Layanan mencakup pajak yang berlaku.
- 4. Jaminan**
- Kami tidak memberikan pernyataan, jaminan atau garansi untuk dapat diandalkannya, ketepatan waktu, kualitas, kesesuaian, ketersediaan, akurasi atau kelengkapan dari Layanan, Situs web dan/atau perangkat

lunak Aplikasi, termasuk namun tidak terbatas pada Layanan yang diperoleh atau berasal dari Penyedia Layanan melalui penggunaan Aplikasi tersebut. Kami tidak menyatakan atau menjamin bahwa (a) penggunaan Layanan dan/atau Aplikasi akan aman, tepat waktu, tanpa gangguan atau terbebas dari kesalahan atau beroperasi dengan kombinasi dengan perangkat keras lain, perangkat lunak, sistem atau data, (b) Layanan akan memenuhi kebutuhan atau harapan anda, (c) setiap data yang tersimpan akan akurat atau dapat diandalkan, (d) kualitas produk, layanan, informasi, atau bahan-bahan lain yang dibeli atau diperoleh oleh anda melalui Aplikasi akan memenuhi kebutuhan atau harapan anda, (e) kesalahan atau kecacatan dalam Aplikasi akan diperbaiki, atau (f) aplikasi atau server(-server)) yang menyediakan Aplikasi terbebas dari virus atau komponen berbahaya lainnya, atau (g) Aplikasi melacak anda atau kendaraan yang digunakan oleh Penyedia Layanan. Layanan disediakan untuk anda terbatas hanya pada dasar "sebagaimana adanya". Semua kondisi, pernyataan dan jaminan, baik tersurat, tersirat, yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebaliknya, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan yang tersirat mengenai jual beli, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau tidak adanya pelanggaran hak pihak ketiga, dengan ini dikecualikan dan dikesampingkan dengan batas tertinggi dan maksimum. Anda mengakui dan menyetujui bahwa seluruh risiko yang timbul dari penggunaan Layanan oleh anda tetap semata-mata dan sepenuhnya ada pada anda dan anda tidak akan memiliki hak untuk meminta ganti rugi apapun dari perusahaan.

## **5. Tanggung Jawab Kami**

- 1) Kami tidak bertanggung jawab atas setiap cedera, kematian, kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh perilaku dari para Penyedia Layanan. Kami juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan, termasuk pelanggaran lalu lintas, atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh Penyedia Layanan selama pelaksanaan Layanan. Penyedia Layanan hanya merupakan mitra kerja kami, bukan pegawai, agen atau perwakilan kami.

- 2) Namun, kami peduli akan keselamatan pengguna Aplikasi dan, atas pertimbangan pribadi semata dan sepenuhnya, kami bersedia untuk memberikan bantuan keuangan jika pengguna mengalami kecelakaan, menderita cedera atau meninggal saat dijemput oleh Penyedia Layanan. Bantuan kami hanya berlaku sejak pengguna dijemput oleh Penyedia Layanan sampai pengguna mencapai tujuannya. Mohon mengingatkan Penyedia Layanan jika anda merasa tidak nyaman dengan cara Penyedia Layanan menyediakan layanan transportasi. Jumlah bantuan keuangan akan ditentukan berdasarkan kebijakan kami.
- 3) Kami juga bersedia untuk memberikan bantuan keuangan sampai dengan Rp 10.000.000 atas pertimbangan pribadi dan mutlak kami untuk barang yang hilang atau rusak saat menggunakan layanan dari Penyedia Layanan sepanjang barang tersebut mematuhi Ketentuan Penggunaan. Kami tidak memiliki asuransi untuk barang yang dikirimkan dan oleh karena itu jika anda ingin barang tersebut diasuransikan selama pengiriman, silakan anda menghubungi penyedia asuransi anda.
- 4) Kami menggunakan cara-cara teknis dan keamanan yang tepat dan wajar untuk menjaga Aplikasi aman dan terbebas dari virus dan kesalahan. Namun demikian, bagaimanapun efektifnya teknologi ini, tidak ada sistem keamanan yang tidak dapat ditembus. Oleh karena itu kami tidak dapat menjamin keamanan database kami dan kami juga tidak dapat menjamin bahwa informasi yang anda berikan tidak akan ditahan/terganggu saat sedang dikirimkan kepada kami.
- 5) Aplikasi ini dapat mengalami keterbatasan, penundaan, dan masalah-masalah lain yang terdapat dalam penggunaan internet dan komunikasi elektronik, termasuk perangkat yang digunakan oleh anda atau Penyedia Layanan rusak, tidak terhubung, berada di luar jangkauan, dimatikan atau tidak berfungsi. Kami tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kegagalan pengiriman, kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh masalah-masalah tersebut.

## **6. Pembatasan Tanggung Jawab**

- 1) Setiap tuntutan terhadap kami dalam hal apapun oleh anda, akan dibatasi dengan jumlah total yang sebenarnya dibayar oleh dan/atau terutang pada Anda ketika menggunakan Layanan selama peristiwa yang menimbulkan klaim tersebut. Dalam hal apapun kami dan/atau pemberi lisensi kami tidak akan bertanggung jawab kepada anda atau siapa pun atas biaya, bunga, kerusakan atau kerugian dalam segala jenis atau bentuk (termasuk cedera pribadi, gangguan emosi dan hilangnya data, barang, pendapatan, keuntungan, penggunaan atau keuntungan ekonomi lainnya). Perusahaan dan/atau pemberi lisensinya tidak akan bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau cedera yang mungkin ditimbulkan oleh atau disebabkan oleh anda atau pada setiap orang untuk siapa anda telah memesan Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian, kerusakan atau cedera yang timbul dari, atau dengan cara apapun sehubungan dengan Layanan dan/atau Aplikasi, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan Layanan dan/atau Aplikasi.
- 2) Anda secara tegas mengesampingkan dan melepaskan kami dari setiap dan semua kewajiban, tuntutan atau kerusakan yang timbul dari atau dengan cara apapun sehubungan dengan Penyedia Layanan. Perusahaan tidak akan menjadi pihak dalam sengketa, negosiasi sengketa antara anda dan Penyedia Layanan. Tanggung jawab untuk keputusan yang anda buat atas Layanan yang ditemukan melalui Aplikasi merupakan tanggung jawab dan melekat seutuhnya dengan dan pada anda. Anda secara tegas mengesampingkan dan melepaskan kami dari setiap dan semua kewajiban, tuntutan, penyebab tindakan, atau kerusakan yang timbul dari penggunaan Layanan, perangkat lunak dan/atau Aplikasi, atau dengan cara apapun terkait dengan Penyedia Layanan yang diperkenalkan kepada anda melalui Aplikasi.
- 3) Kualitas Layanan yang diperoleh melalui penggunaan Aplikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Layanan yang pada akhirnya memberikan Layanan untuk anda. Anda memahami, oleh karena itu, bahwa dengan menggunakan Aplikasi ini, Anda dapat dihadapkan pada transportasi yang berpotensi berbahaya, ofensif,

berbahaya bagi anak di bawah umur, tidak aman atau tidak pantas, dan bahwa Anda menggunakan layanan atas risiko anda sendiri.

## **7. Ganti Rugi**

Dengan menggunakan Aplikasi ini, anda setuju bahwa anda akan membela, memberikan ganti rugi dan membebaskan kami, pemberi lisensi, afiliasi, dan masing-masing dari petugas, direktur, komisaris, karyawan, pengacara dan agen kami dari dan terhadap setiap dan semua klaim, biaya, kerusakan, kerugian, kewajiban dan biaya (termasuk biaya dan ongkos pengacara) yang timbul dari atau sehubungan dengan: (a) penggunaan Layanan dan/atau Aplikasi oleh anda, hubungan anda dengan Penyedia Layanan, penyedia pihak ketiga, mitra, pemasang iklan dan/atau sponsor, atau (b) pelanggaran atas atau tidak dipatuhinya salah satu Ketentuan Penggunaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang disebutkan di sini atau tidak atau (c) pelanggaran anda terhadap hak-hak pihak ketiga, termasuk Penyedia Layanan pihak ketiga yang diatur melalui Aplikasi, atau (d) penggunaan atau penyalahgunaan Aplikasi. Kewajiban pembelaan dan pemberian ganti rugi ini akan tetap berlaku walaupun Ketentuan Penggunaan dan penggunaan Situs oleh anda telah berakhir.

## **8. Perijinan**

- 1) Dengan tergantung pada kepatuhan anda pada Ketentuan Penggunaan, kami memberikan anda ijin yang terbatas, non-eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat dialihkan, tidak dapat disublisensikan, ijin yang dapat ditarik untuk mengunduh dan memasang salinan Aplikasi pada suatu perangkat bergerak tunggal yang anda miliki atau kontrol dan menjalankan salinan Aplikasi semata-mata untuk kebutuhan pribadi, non-komersial anda sendiri.
- 2) Anda tidak diperkenankan (i) menyalin, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, membuat karya turunan dari, mendistribusikan, memberikan lisensi, menjual, mengalihkan, menampilkan di muka umum, membuat ulang, mentransmisikan, memindahkan, menyiarkan, menguraikan, atau membongkar bagian manapun dari atau dengan cara lain yang mungkin mengeksploitasi Aplikasi, kecuali sebagaimana diperbolehkan dalam Ketentuan Penggunaan ini, (ii) memberikan



lisensi, mensublisensikan, menjual, menjual kembali, memindahkan, mengalihkan, mendistribusikan atau mengeksploitasi secara komersial atau membuat tersedia kepada pihak ketiga Aplikasi dan / atau perangkat lunak dengan cara; (iii) menciptakan "link" internet ke Aplikasi atau "frame" atau "mirror" setiap perangkat lunak pada server lain atau perangkat nirkabel atau yang berbasis internet; (iv) merekayasa ulang atau mengakses perangkat lunak kami untuk (a) membangun produk atau layanan tandingan, (b) membangun produk dengan menggunakan ide, fitur, fungsi atau grafis sejenis Aplikasi, atau (c) menyalin ide, fitur, fungsi atau grafis Aplikasi, (v) meluncurkan program otomatis atau script, termasuk, namun tidak terbatas pada, web spiders, web crawlers, web robots, web ants, web indexers, bots, virus atau worm, atau segala program apapun yang mungkin membuat beberapa permintaan server per detik, atau menciptakan beban berat atau menghambat operasi dan/atau kinerja Aplikasi, (vi) menggunakan robot, spider, pencarian situs/aplikasi pengambilan kembali, atau perangkat manual atau otomatis lainnya atau proses untuk mengambil, indeks, "tambang data" (data mine), atau dengan cara apapun memperbanyak atau menghindari struktur navigasi atau presentasi dari aplikasi atau isinya; (vii) menerbitkan, mendistribusikan atau memperbanyak dengan cara apapun materi yang dilindungi hak cipta, merek dagang, atau informasi yang dimiliki lainnya tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemilik hak milik, (viii) menghapus setiap hak cipta, merek dagang atau pemberitahuan hak milik lainnya yang terkandung dalam aplikasi. Tidak ada lisensi atau hak yang diberikan kepada anda dengan implikasi berdasarkan hak kekayaan intelektual dimiliki atau dikendalikan oleh kami atau pemberi lisensi kami, kecuali untuk lisensi dan hak tersebut secara tegas diberikan dalam Ketentuan Penggunaan ini.

- 3) Anda (i) tidak akan mengirim spam atau pesan yang bersifat duplikasi atau tidak diminta yang melanggar hukum berlaku; (ii) tidak akan mengirim atau menyimpan materi yang melanggar, cabul, mengancam,



memfitnah, atau melanggar hukum atau bersifat sadis, termasuk namun tidak terbatas pada bahan berbahaya bagi anak-anak atau yang melanggar hak privasi pihak ketiga; (iii) tidak akan mengirim bahan yang mengandung virus piranti lunak, worm, trojan horses atau kode komputer berbahaya lainnya, dokumen/file, script, agen atau program; (iv) tidak mengganggu atau mengacaukan integritas atau kinerja Aplikasi atau data di dalamnya; (v) tidak mencoba untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke Aplikasi atau sistem atau jaringan terkait; (vi) tidak berkedok sebagai orang atau badan lain atau menggambarkan diri anda sebagai afiliasi seseorang atau suatu badan; dan (vii) menahan diri untuk terlibat dalam tindakan yang mungkin bisa merusak reputasi kami atau dianggap dapat merusak reputasi kami.

- 4) Kami akan memiliki hak untuk menyelidiki dan menuntut setiap pelanggaran di atas sepanjang yang dimungkinkan oleh hukum. Kami dapat melibatkan dan bekerja sama dengan pihak penegak hukum dalam menuntut pengguna yang melanggar Ketentuan Penggunaan ini. Anda mengakui bahwa kami tidak memiliki kewajiban untuk memonitor akses anda ke atau penggunaan Situs web atau Aplikasi, tapi kami memiliki hak untuk melakukannya untuk tujuan pengoperasian Situs web dan Aplikasi, untuk memastikan kepatuhan dengan Ketentuan Penggunaan ini, atau untuk mematuhi peraturan yang berlaku atau perintah atau persyaratan dari pengadilan, lembaga administratif atau badan pemerintahan lainnya.

## **9. Hal-hal Terkait Kekayaan Intelektual**

- 1) GO-JEK, termasuk nama dan logo, Aplikasi dan Layanan, dilindungi oleh hak cipta, merek dagang dan hak-hak lain yang disediakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Kami (dan pemberi lisensi kami, sebagaimana berlaku) secara eksklusif memiliki semua hak, kepemilikan dan kepentingan dalam dan terhadap Aplikasi, termasuk semua hak kekayaan intelektual terkait.
- 2) Tanpa menyimpang dari hak kami berdasarkan hukum yang berlaku atau Ketentuan Penggunaan, anda diberitahukan bahwa setiap berusaha atau pelanggaran nyata atas ketentuan ini akan mengakibatkan

penghentian semua hak anda di bawah Ketentuan Penggunaan. Jika anda menghindari salah satu cara yang kami ambil untuk melindungi layanan dari penggunaan secara tidak sah, anda harus segera menghentikan setiap dan semua penggunaan Layanan, dan anda setuju untuk melakukannya.

#### **10. Pengakhiran**

- 1) Anda tidak berkewajiban untuk menggunakan Aplikasi dan dapat memilih untuk berhenti menggunakannya setiap saat dengan membatalkan akun anda dan secara permanen menghapus aplikasi dari perangkat anda, sehingga menonaktifkan penggunaan Aplikasi tersebut. Ketentuan Penggunaan secara otomatis berakhir ketika anda secara permanen menghapus aplikasi dari perangkat.
- 2) Anda dapat mengakhiri akun anda dengan memberitahu kami maksud anda untuk membatalkan akun anda. Kami akan mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan penghentian, termasuk mengembalikan GO-JEK Credit anda (tidak termasuk jumlah yang diperoleh dari rujukan (referral code) atau promosi lainnya) dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- 3) Kami berhak untuk segera menangguhkan, membatasi atau menghentikan Ketentuan Penggunaan dan penggunaan Aplikasi jika kami memiliki alasan untuk mencurigai bahwa anda telah melanggar ketentuan dari Ketentuan Penggunaan ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Jika anda secara permanen menghapus aplikasi atau berhenti menggunakan Aplikasi secara permanen, melalui pemberitahuan kepada kami dalam 14 (empat belas) hari kerja sebelum penghapusan atau penghentian, saldo GO-JEK Credit anda dapat ditarik, namun terbatas pada nilai uang elektronik anda dan tidak termasuk jumlah nilai yang setara dengan nilai uang. Dalam hal kematian, ahli waris anda yang sah dengan pemberitahuan kepada kami dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah kematian, dengan pernyataan yang sah yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau keputusan pengadilan yang final dan mengikat, dapat mengklaim saldo

GO-JEK Credit Anda, namun terbatas pada nilai uang elektronik anda dan tidak termasuk jumlah nilai yang setara dengan nilai uang.

#### **11. Lain-lain**

- 1) Pengesampingan atau toleransi atau kegagalan kami untuk mengklaim suatu pelanggaran ketentuan dari Ketentuan Penggunaan ini atau untuk melaksanakan hak yang dinyatakan oleh Ketentuan Penggunaan ini atau hukum yang berlaku, tidak akan dianggap sebagai pengesampingan sehubungan dengan pelanggaran berikutnya dari setiap ketentuan dari Ketentuan Penggunaan ini.
- 2) Ketentuan Penggunaan ini disusun dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kedua versi akan mengikat anda dan kami. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia yang akan berlaku.
- 3) Anda tidak dapat memindahkan atau mengalihkan hak anda berdasarkan Ketentuan Penggunaan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami. Kami dapat mengalihkan hak kami berdasarkan Ketentuan Penggunaan kepada pihak semata-mata dan mutlak menurut kebijakan kami.
- 4) Jika ada istilah berdasarkan Ketentuan Penggunaan yang dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, baik secara keseluruhan atau sebagian, berdasarkan pengundangan atau ketentuan perundang-undangan, istilah atau bagian dari istilah tersebut akan, sepanjang, dianggap bukan bagian dari Ketentuan Penggunaan ini, namun legalitas, keabsahan atau keberlakuan dari Ketentuan Penggunaan selebihnya tidak akan terpengaruhi.
- 5) Ketentuan Penggunaan ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap dan semua sengketa yang timbul dari penggunaan layanan kami akan diatur oleh yurisdiksi eksklusif dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 6) Ketentuan Penggunaan ini dapat dimodifikasi dan diubah dari waktu ke waktu. Kami akan memberitahu anda melalui Aplikasi dan/atau email atas modifikasi, dan/atau perubahan atas Ketentuan Penggunaan. Penggunaan Aplikasi secara terus menerus setelah diterimanya

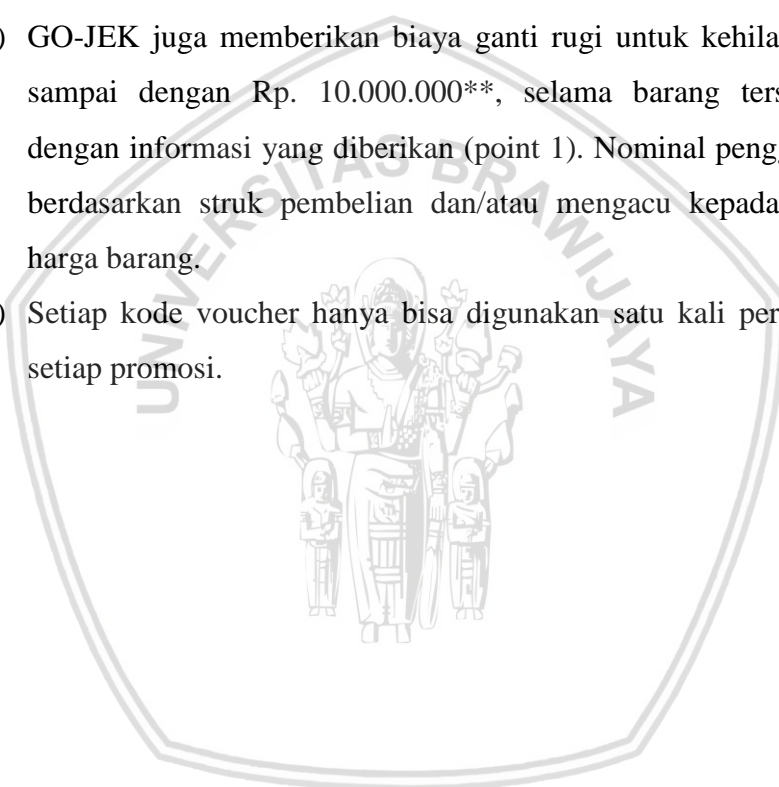
pemberitahuan ini merupakan persetujuan dan penerimaan anda atas modifikasi, dan/atau perubahan.

## 12. Syarat dan Ketentuan

- 1) Pelanggan wajib memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai jenis dan spesifikasi barang yang akan dikirimkan.
- 2) GO-JEK tidak menyediakan box khusus untuk pengiriman. Pelanggan bertanggung jawab untuk mengemas dengan layak barang yang akan dikirimkan. Untuk barang rapuh yang terbuat dari kaca, keramik dan termasuk juga kue, ice cream, makanan dan bunga segar, disarankan agar dikemas secara khusus. GO-JEK tidak bertanggung jawab untuk kerusakan atau perubahan bentuk yang terjadi atas pengiriman barang-barang tersebut.
- 3) Para pengemudi GO-JEK adalah pengemudi yang sudah mendapatkan pengarahan untuk mengendarai kendaraannya dengan cara yang aman. Namun pelanggan yang menggunakan jasa transportasi bertanggung jawab untuk keselamatan mereka sendiri. Oleh karena itu jika anda merasa tidak nyaman dengan cara pengemudi GO-JEK mengendarai motornya, harap untuk segera mengingatkan pengemudi agar lebih berhati-hati.
- 4) GO-JEK tidak memberikan layanan pengiriman untuk barang-barang yang termasuk dibawah ini:
  - a. Barang yang dilarang oleh pihak berwajib untuk dimiliki atau diedarkan.
  - b. Pengiriman barang dari dan ke penjara.
  - c. Binatang peliharaan.
  - d. Barang yang dimensinya lebih dari 70cm (panjang), 50cm (lebar), 50cm (tinggi) atau barang yang beratnya melebihi 20 kg.
- 5) GO-JEK tidak bertanggung jawab secara langsung untuk kecelakaan yang melibatkan driver GO-JEK baik kerusakan terhadap kendaraan maupun luka badan yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut. Tanggung jawab atas seluruh biaya serta tuntutan yang mungkin timbul atas kejadian tersebut akan menjadi tanggung jawab pribadi driver GO-JEK. Jika ada informasi yang dapat membantu untuk proses

investigasi seperti nomor plat motor, maka GO-JEK hanya dapat membantu sebagai mediator dalam mempertemukan kedua pihak untuk mencari penyelesaian masalah tersebut.

- 6) PT Aplikasi Karya Anak Bangsa memberikan santunan musibah kecelakaan kepada seluruh pelanggan GO-JEK yang menggunakan layanan. Konsumen akan menerima penggantian sampai dengan Rp. 10.000.000\* dan untuk biaya rumah sakitnya sampai dengan Rp. 5.000.000\*. untuk informasi lebih lanjut, mohon kunjungi GO-RIDE halaman FAQ.
- 7) GO-JEK juga memberikan biaya ganti rugi untuk kehilangan barang sampai dengan Rp. 10.000.000\*\*, selama barang tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan (point 1). Nominal penggantian akan berdasarkan struk pembelian dan/atau mengacu kepada nilai wajar harga barang.
- 8) Setiap kode voucher hanya bisa digunakan satu kali per akun untuk setiap promosi.







## **PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN**

Nomor : / GI-MITRA / I / 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, PT. Go-Jek Indonesia, Jln. Kemang Selatan Raya No. 99 B Jakarta Selatan 12730 disebut sebagai Mitra I - telah sepakat dengan mitra kerjanya:

Nama : .....  
 Tanggal Lahir : .....  
 Status : .....  
 KTP No. : .....  
 No. HP : .....  
 Alamat : .....

Disebut sebagai Mitra II, untuk mengadakan kerjasama kemitraan dengan system bagi hasil terhitung mulai tanggal..... dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **PASAL 1**

#### **Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Mitra II**

Rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab Mitra II adalah menerima dan melaksanakan order yang diberikan oleh Mitra I baik melalui aplikasi android maupun call centre atau yang diatur oleh perusahaan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini.

### **PASAL 2**

#### **Perjanjian Bagi Hasil**

Penetapan pembagian hasil dan system pembayarannya akan diatur dalam kesepakatan tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini.

### **PASAL 3**

#### **Kewajiban Mitra II**

1. Mitra II berkewajiban untuk melaksanakan order yang diberikan oleh Mitra I, dengan sebaik-baiknya, serta memegang teguh disiplin dan rahasia Mitra I,
2. Mitra II wajib menaruh salah satu dokumen yang disyaratkan sebagai jaminan kepada Mitra I.
3. Mitra II wajib memiliki Kendaraan bermotor roda dua yang masih baik dan layak, memiliki Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku untuk melaksanakan kerjasama kemitraan ini.
4. Mitra II dalam melaksanakan tugasnya wajib menjaga kebersihan penampilan, bersepatu, menggunakan seragam dan atribut yang dipinjamkan oleh Mitra I.
5. Mitra I meminjamkan kepada Mitra II berupa : 2 Buah Jaket Go-Jek, 2 Buah Helm Go-Jek dan Mitra II wajib menjaga serta memelihara seragam dan atribut tersebut, kehilangan maupun kerusakan terhadap atribut tersebut diatas dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per satuan seragam/atribut

### **PASAL 4**

#### **Alat Pendukung Kerja**

Mitra I memberikan alat kerja kepada Mitra II berupa Handphone Android yang harus di angsur selama 25 minggu dengan angsuran per minggu Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). Apabila Mitra II mengundurkan diri sebelum lunas maka Handphone tersebut dikembalikan kepada Mitra I dan Mitra I akan mengembalikan angsuran yang telah disetorkan Mitra II sebesar 75%.

### **PASAL 5**

#### **Sebab-sebab Berakhimya Kerjasama Kemitraan**

1. Mitra I tidak mempunyai pekerjaan untuk Mitra II karena :
  - a. Selesainya perjanjian kerjasama Mitra I dengan Perusahaan.
  - b. Mitra I tidak mempunyai proyek kerja lagi yang cocok untuk Mitra II.



5. Alasan-alasan lain, yaitu :
- Kesehatan yang tidak baik / sakit berkepanjangan.
  - Cacat, yang menyebabkan tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaan.
  - Meninggal dunia.

#### **PASAL 6** **Larangan - Larangan**

Larangan/hal-hal yang tidak boleh Mitra II lakukan antara lain :

- Memberikan keterangan dan data pribadi palsu atau yang dipalsukan.
- Minum minuman keras, mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba di lokasi Perusahaan Mitra I dan corporate.
- Melakukan perbuatan asusila di lokasi kerja Mitra I dan corporate.
- Melakukan tindakan kejahatan, misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan Mitra I.
- Penganiayaan, menghina secara kasar atau mengancam mitra kerja lainnya.
- Membujuk mitra kerja lainnya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.
- Dengan sengaja atau karena kecerobohan merusak atau membiarkan dalam keadaan berbahaya alat-alat/ barang / perlengkapan milik Mitra I dan Pelanggan.
- Dengan sengaja walaupun sudah diperingatkan, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri dan atau mitra kerja lainnya dalam keadaan bahaya.
- Membongkar rahasia Mitra I atau mencemarkan nama baik Mitra I maupun pimpinan Mitra I dan keluarga Mitra I.

#### **PASAL 7** **Rahasia Perusahaan Mitra I**

- Selama bekerjasama ataupun setelah berhenti bekerjasama dengan Mitra I, Mitra II dilarang untuk memberikan pengetahuan dan/atau informasi dalam bentuk apapun juga yang diperoleh Mitra II selama bekerjasama pada Mitra I, baik kepada perorangan dan/atau kepada pihak lain, termasuk juga informasi mengenai pelanggan, kegiatan bisnis, maupun transaksi yang dilakukan oleh Mitra I maupun oleh pelanggan, kecuali telah mendapatkan izin secara tertulis dari pimpinan perusahaan Mitra I.
- Mitra II dengan ini menyatakan setuju dan telah memahami bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 Ayat 1 dan Ayat 2 tersebut diatas merupakan suatu bentuk kesalahan berat yang dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kemitraan terhadap Mitra II.

#### **PASAL 8** **Hal-hal Lain**

Apabila Mitra II berkeinginan untuk memutuskan hubungan kemitraan ini, Mitra II diharuskan untuk memberitahukan kepada Mitra I paling sedikit 1 (satu) minggu sebelumnya, dan Mitra II mengembalikan semua kelengkapan dan atribut yang dipinjamkan oleh pihak Mitra I dan Mitra I akan mengembalikan dokumen yang dijadikan jaminan sebelumnya.

Demikian surat perjanjian kerjasama kemitraan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Setelah para pihak menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan ini, maka para pihak dianggap telah mengerti serta menyetujui segala isi perjanjian ini dan akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta,

2015

Mitra I,  
PT. Go-Jek Indonesia

Mitra II,

**GOJEK**



Rangkap 2 : 1. Untuk Mitra I  
2. Untuk Mitra II

**Perhatian!!** Apabila data Mitra II yang tersebut diatas ada kekeliruan/perubahan dan tidak sesuai lagi dengan kenyataan, harap dilaporkan kepada Mitra I yang dalam hal ini diwakili oleh Departemen HRD Mitra I.

Lampiran III

LEMBAR DETEKSI PLAGIASI

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505  
E-mail : hukum@ub.ac.id  
http://hukum.ub.ac.id

**SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI**  
Nomor: 768/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : NADHIFAH HIDAYUNI HAMZAH  
NIM : 145010107111070  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG TRANSPORTASI SEWA  
KHUSUS ATAS ADANYA RISIKO KECELAKAAN

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Agustus 2018  
Ketua Deteksi Plagiasi,

**ISSUED**  
**PLAGIASI FH UB**

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.  
NIP. 196111161986011001